

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era sekarang, sebuah konsep administrasi publik adalah suatu hal yang semakin diperhitungkan oleh masyarakat, yang mana dalam konsep tersebut diharapkan bisa mengatasi permasalahan permasalahan yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hal ini juga telah tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke IV, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan adil dan makmur. Usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat diperoleh salah satunya melalui konsep pembangunan. Pembangunan apapun bentuknya, tujuan akhirnya adalah untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat. Agar pembangunan dapat berjalan lancar, efisien dan efektif maka perlu dukungan dari masyarakat, dalam bentuk adanya kesiapan mental dan intelektual serta kerja keras seluruh anggota masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam berbagai program pembangunan. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkelanjutan yang meliputi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembangunan masyarakat sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat-masyarakat itu ke dalam kehidupan bangsa, dan memungkinkan mereka untuk memberi sumbangan sepenuhnya bagi

kemajuan nasional. Pembangunan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat membahas dan merumuskan kebutuhan mereka, merencanakan usaha pemenuhannya, dan melaksanakan rencana itu sebaik-baiknya. Pembangunan masyarakat ditujukan untuk mengurangi kemiskinan (Ndraha,1990:101).

Pembangunan masyarakat merupakan salah satu konsep yang ditawarkan dalam membangun komunitas di dalam pembangunan nasional. Pembangunan masyarakat juga bekerja pada beberapa anggapan dasar. Menurut Ndraha (1990:93) anggapan dasar yang dimaksud adalah:

1. Komunitas sebagai unit kerja, kendatipun tiap komunitas berbeda dalam kualitas dan kuantitas
2. Kegiatan berdasarkan prakarsa lokal dan kepemimpinan lokal.
3. Andalan pada sumber-sumber lokal dan sumber dari luar jika perlu. Sumber lokal utama adalah sumberdaya manusia.
4. Partisipasi masyarakat
5. Pembangunan masyarakat bekerja tingkat komunitas

Dari anggapan dasar tersebut, dari salah satu berbagai permasalahan sosial yang terjadi, yakni masalah kemiskinan yang diharapkan dapat diatasi dengan adanya konsep pembangunan masyarakat, Masih besarnya jumlah angka penduduk miskin merupakan fokus utama dalam pembangunan nasional. Permasalahan kemiskinan dari waktu ke waktu juga masih menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Selain itu dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Hal ini semakin menguatkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda

yang penting dalam upaya pembangunan nasional, sebagaimana yang telah dituliskan dalam RPJMN Tahun 2009-2014.

Menurut data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2011 jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan maret 2011 sebanyak 30,02 juta orang.

Ada 14 (empat belas) kriteria yang dipergunakan untuk menentukan keluarga/ rumah tangga dikategorikan miskin menurut Badan Statistik adalah:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu / kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai /air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah / tidak tamat SD/ hanya SD
14. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya (BPS, 2011).

Berbagai konsep yang dikemukakan untuk mengatasi kemiskinan. Salah satu konsepnya mengemukakan bahwa pemerintah harus melakukan kebijakan alternatif, yakni perlu adanya perubahan-perubahan kelembagaan dalam empat hal, yakni produksi, pemasaran, distribusi pengelolaan, dan konsumsi (Mashoed, 2006:03). Dengan kata lain pemerintah perlu meningkatkan salah satu perannya

dalam modal produksi dan pertumbuhan pembangunan masyarakat. Pemecahan masalah kemiskinan hendaknya didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin itu sendiri. Dari pemahaman suara tersebut harapannya fokus kebijakan dan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, harus lebih memperhatikan dan mengedepankan pemenuhan hak-hak dasar sekaligus menguatkan kapasitas masyarakat miskin agar bisa bergerak menjauh dari titik kemiskinan.

Prioritas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang menjadi prioritas Bappenas adalah peningkatan peran pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan, yang didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin itu sendiri, dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Penghormatan memiliki makna bahwa fokus kebijakan dan pelayanan publik, pemerintah daerah harus memperhatikan dan mengedepankan pemenuhan hak-hak dasar sekaligus menguatkan kapasitas masyarakat miskin agar terbebas dari belenggu kemiskinan. Perlindungan bermakna bahwa adanya kebijakan nyata dan sungguh-sungguh untuk mencegah dan melindungi orang miskin dari ancaman kerentanan sehingga memiliki keamanan dan peluang untuk berkembang. Pemenuhan berarti bahwa upaya menggunakan sumber daya dan sumber dana yang tersedia dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin, termasuk menggerakkan secara aktif sumber daya dari masyarakat, swasta, dan berbagai pihak. Dari pemahaman tersebut, diharapkan pemantapan dan penajaman berbagai upaya pemenuhan hak-hak dasar khususnya melalui program penciptaan lapangan kerja dan usaha, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, dan pemenuhan

kebutuhan pangan; pengembangan sistem informasi manajemen, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi, serta sistem pengendalian dan pengawasan; serta sosialisasi dan asistensi kepada pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan hak dasar rakyat.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, mendorong, memberi inovasi dan membangkitkan kesadaran yang dimiliki serta mengembangkannya (Suprpto, 2002:187). Pemberdayaan masyarakat bukanlah suatu fenomena baru yang masuk dalam tata kehidupan masyarakat tetapi pemberdayaan yang dikaitkan dengan usaha pemerataan, kemandirian dan keberpihakan kepada masyarakat kecil. Pemberdayaan masyarakat bertujuan peningkatan pendapatan masyarakat, yang mana dengan meningkatnya pendapatan maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat (Suharto 2009).

Salah satu tantangan upaya kemiskinan adalah bagaimana mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan, sebab pembangunan tanpa partisipasi masyarakat hanya akan menimbulkan ketergantungan dan masyarakat hanya menjadi objek dalam pembangunan. Selama beberapa tahun pembangunan Indonesia, kelompok lapisan masyarakat bawah belum secara aktif dilibatkan

dalam pembangunan. Persepsi negatif yang muncul adalah bahwa kelompok masyarakat bawah kurang partisipatif dalam pembangunan.

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengurangi pengentasan Kemiskinan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, pemerintah telah meluncurkan PNPM Mandiri mulai tahun 2007. PNPM Mandiri merupakan upaya pemerintah untuk menselaraskan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Selama ini program-program tersebut dilaksanakan secara sektoral dan parsial dengan pendekatan dan prosedur yang beragam.

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. (<http://www.pnpm-mandiri.org>).

PNPM Mandiri diharapkan akan mengurangi inefisiensi dan inefektivitas pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat. Adanya PNPM Mandiri, upaya pengurangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak diharapkan dapat dilaksanakan secara bersinergi dengan sasaran program masyarakat miskin dan wilayah tertinggal. PNPM Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program PNPM adalah Bantuan Langsung Masyarakat. Bantuan Langsung

Masyarakat (BLM) Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin (<http://www.pnpm-mandiri.org>).

Kabupaten Tulungagung adalah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia. Selain industri marmer, di Tulungagung juga tumbuh dan berkembang berbagai industri kecil dan menengah yang kebanyakan memproduksi alat-alat/perkakas rumah tangga, batik, dan konfeksi. Hal yang menarik di Tulungagung mengenai pemanfaatan BLM yakni sudah ada beberapa kecamatan yang memanfaatkan dana ini untuk masyarakat untuk mendukung kegiatan di bidang peningkatan kapasitas, pembangunan dan rehabilitasi sarana/prasarana perdesaan, kegiatan pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan ekonomi melalui perguliran dana Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP). Namun dalam kecamatan lain, masih kurangnya pemanfaatan mengenai dana bantuan langsung masyarakat ini (www.radartulungagung.co.id).

Dari uraian diatas, peneliti berpikir pentingnya memahami pengaruh program nasional pemberdayaan masyarakat di Tulungagung. Maka dari itu, peneliti ingin mengambil judul “PENGARUH BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PNPM MANDIRI DAN BANTUAN DANA PENDAMPINGAN PNPM MANDIRI TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Pada Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung 2013)”. Harapannya penelitian ini mampu menjadi media pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu administrasi publik tentang pengaruh PNPM dalam pengentasan Kemiskinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan secara simultan dan parsial antara PNPM (X) yaitu Dana Bantuan Langsung Masyarakat (X_1) dan Bantuan Dana Pendampingan (X_2) terhadap pengentasan Kemiskinan (Y) di Kabupaten Tulungagung?
2. Variabel independen manakah dari Dana Bantuan Langsung Masyarakat (X_1) dan Pemavingan Jalan (X_2) yang mempunyai pengaruh dominan terhadap pengentasan Kemiskinan (Y) di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui pengaruh signifikan secara simultan dan parsial antara PNPM (X) yaitu Dana Bantuan Langsung Masyarakat (X_1) dan Bantuan Dana Pendampingan (X_2) terhadap penurunan pengentasan Kemiskinan (Y) di Kabupaten Tulungagung.
2. Mengetahui variabel independen dari Dana Bantuan Langsung Masyarakat (X_1) dan Bantuan Dana Pendampingan (X_2) yang mempunyai pengaruh dominan terhadap pengentasan Kemiskinan (Y) di Kabupaten Tulungagung.

D. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Kontribusi Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam rangka memberdayakan masyarakat dan membangun masyarakat di Kabupaten Tulungagung
 - b. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi mereka yang berminat dan sebagai bahan perbandingan serta dasar untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.
2. Kontribusi Teoritis
 - a. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat merangsang penelitian lebih lanjut mengenai upaya mewujudkan kemandirian masyarakat desa dan atau kelurahan.
 - b. Sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi dalam ruang lingkup pengentasan Kemiskinan melalui PNPM mandiri khususnya program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Bantuan Dana Pendampingan.

E. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan skripsi ini sistematika pembahasan yang digunakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori teori yang digunakan dalam pemecahan masalah berkaitan dengan judul atau tema yang diangkat oleh peneliti. Teori yang digunakan mulai dari teori pembangunan, teori pembangunan masyarakat, teori pemberdayaan masyarakat sampai teori kemiskinan, serta menjelaskan beberapa konsep mengenai PNPM Mandiri. Bab ini juga menjelaskan hipotesis yang digunakan penulis dalam penelitian kuantitatif.

BAB III METODE PENELITIAN

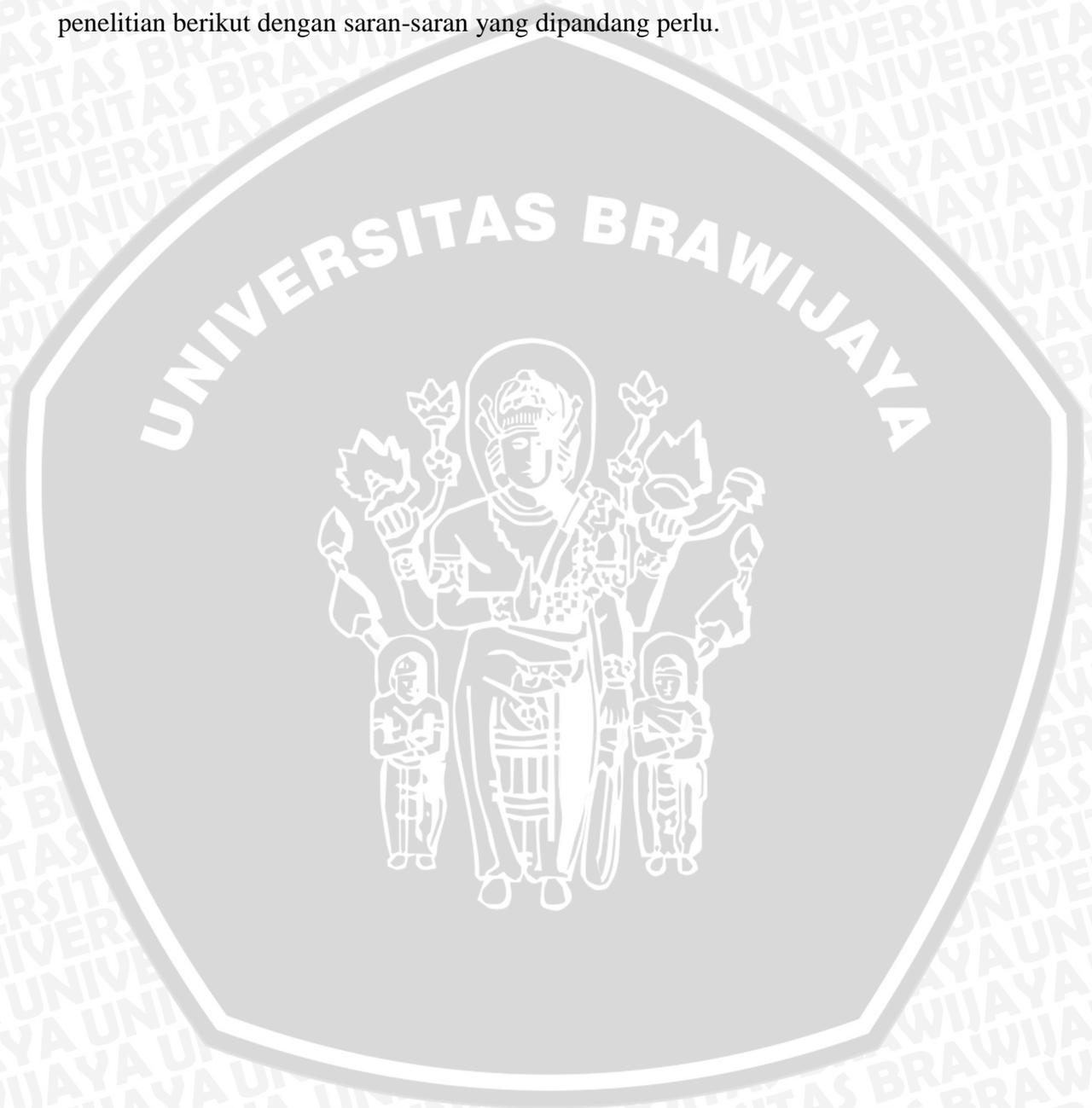
Menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, yang memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel dan pengukuran, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan secara garis besar isi dari hasil penelitian dan pembahasan yang mengulas tentang analisis data penelitian, interpretasi hasil analisis data penelitian. Analisa data penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari analisis tersebut, dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh serta korelasi antara variabel terikat dengan variabel bebas. Sehingga dapat diketahui hasil penelitian dalam membuktikan kebenaran hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari interpretasi hasil analisis data penelitian berikut dengan saran-saran yang dipandang perlu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai rujukan awal dari peneliti dalam menjajaki, menguraikan, serta menerangkan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bobby Ridwan Simaremare (2011)

Penelitian yang dilakukan oleh Bobby Ridwan Simaremare berjudul “Pengaruh Program PNPM-P2KP terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sidikalang Kabupaten Dairi”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan program PNPM-P2KP terhadap sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Sidikalang. Metode yang digunakan adalah Explanatory Research yaitu untuk menguji hubungan antara Program PNPM P2KP (variabel x) dengan Sosial Ekonomi (variabel y).

Hasil penelitian menunjuka bahwa Program PNPM-P2KP memiliki hubungan yang sangat rendah sekali dengan Sosial Ekonomi Masyarakat. Hal ini terbukti dari hasil perhitungan dimana $r = 0,037$. Sementara Koefisien determinasi diperoleh adalah 0,1369 % dan sisanya 99,87 % dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini.

Besaran pengaruh program PNPM-PK2KP (variabel x) terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (variabel y) diperoleh $Y=29,24+0,100X$, artinya apabila Program PNPM-P2KP dinaikn 1 kali maka Sosial Ekonomi Masyarakat akan meningkat sebesar 29,34. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar pengaruh Program PNPM-P2KP maka Sosial Ekonomi masyarakat semakin meningkat.

2. Diana Agustina Imbarwati (2009)

Penelitian yang dilakukan oleh Diana Agustina Imbarwati yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan (Studi tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri (PNPM-Mnadiri) di kelurahan di Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Penelitian ini memiliki tujuan mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan PNPM Mandiri dalam pengentasan kemiskinan beserta manfaat bagi masyarakat miskin kelurahan Dinoyo. Selain itu penelitian juga mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat Dinoyo dalam upaya meningkatkan keberdayaan melalui PNPM Mandiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kemacetan dalam angsuran dana bantuan. Kemudian kurangnya sosialisasi oleh BKM tentang arti pentingnya PNPM mandiri kepada guna penyelenggaraan pelatihan bagi KSM.

3. Wahyu Safarulloh (2008)

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Safarullah berjudul “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang)”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk

mengetahui dan menggambarkan proses, tingkat efektifitas, serta faktor pendukung dan penghamabat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Safarulloh, yakni Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dilakukan BKM Polowijen belum berjalan maksimal. Kegiatan hanya sebatas pembangunan infrastruktur. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi yakni pinjaman modal usaha untuk masyarakat belum berjalan dikarenakan minim dana. Dalam pelaksanaan sendiri juga kurang efektif karena dinilai dalam PNPM in, masyarakat kurang berpartisipasi pada tujuan inti PNPM.

B. Pembangunan

Kesejahteraan sosial merupakan suatu tujuan yang harus dicapai dalam setiap pembangunan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan juga berupaya menumbuhkan aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Memiliki komitmen dan orientasi terhadap pembangunan nasional ialah salah satu tujuan dari setiap negara berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, dan modernisasi bangsa guna peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat.

1. Definisi Pembangunan

Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Maka dari itu, diperlukan suatu proses

untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga dalam proses pembangunan terciptanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah (UU No 25 Tahun 2004).

Istilah pembangunan menurut para ahli jika dikaitkan dengan proses bernegara. Pembangunan merupakan usaha yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya (Nasution, 2004:15). Bagi negara berkembang khususnya, pembangunan menjadi kajian penting dalam setiap kegiatan negara dan telah menjadi sesuatu yang dapat memotivasi untuk meraih tujuan bernegara yakni kesejahteraan sosial. Pembangunan sering diartikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil perkapita melalui peningkatan jumlah dan produktifitas sumber daya (Kartasasmita, 2006:34). Selain itu ada yang menyebutkan tentang tinjauan terhadap konsep pembangunan dengan cara mengkaji dari dua aspek penting, yakni secara etimologik dan secara ensiklopedik.

“Secara etimologik, istilah pembangunan berasal dari kata *bangun*. Kata *bangun* setidaknya mengandung 4 arti: (1) bangun dalam arti sadar atau siuman (aspek fisiologis), (2) bangun dalam arti bangkit atau berdiri (aspek perilaku), (3) bangun dalam arti bentuk (aspek anatomi), (4) bangun dalam arti kata kerja membuat, mendirikan, atau membina (gabungan aspek fisiologis, perilaku, dan aspek anatomi). Sedangkan secara ensiklopedik, kata pembangunan telah menjadi bahasa dan konsep dunia. Konsep itu diantara lain dianalogkan dengan konsep: pertumbuhan (*growth*), rekonstruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*), westernisasi (*westernization*), perubahan sosial (*social change*), pembebasan (*liberation*), pembaharuan (*innovation*), pembangunan bangsa (*nation building*), pembangunan nasional (*national development*), dan pembinaan (*construction*)” (Suryono, 2004:26).

Sehingga dalam pengertian tersebut, bahwasanya pembangunan meliputi segala aspek kehidupan baik itu ekonomi, politik, maupun struktur sosial.

2. Pembangunan Masyarakat

Pembangunan masyarakat merupakan suatu proses, baik ikhtiar masyarakat yang bersangkutan yang diambil berdasarkan prakarsa sendiri, maupun kegiatan pemerintah, dalam rangka untuk memperbaiki kondisi ekonomi sosial dan kebudayaan masyarakat (komunitas). Mengintegrasikan berbagai komunitas itu dalam kehidupan bangsa dan memampukan mereka untuk memberikan sepenuhnya demi kemajuan bangsa dan Negara berjalan terpadu di dalam proses tersebut. Proses tersebut meliputi elemen dasar: pertama, partisipasi masyarakat itu sendiri dalam rangka usaha mereka untuk memperbaiki tarap hidup mereka. Sedapat-dapatnya berdasarkan kekuatan dan prakarsa sendiri. Kedua, bantuan dan pelayanan teknik yang bermaksud membangkitkan prakarsa, tekad untuk menolong diri sendiri dan kesediaan untuk menolong orang lain, dari pemerintah. Proses tersebut dinyatakan dalam berbagai program yang dirancang untuk perbaikan proyek khusus terhadap proyek khusus (Ndraha, 1990:73)

Pembangunan masyarakat dalam arti sempit ini dikaitkan dengan berbagai proyek atau program yang langsung berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dan pengurusan kepentingan lokalitas atau masyarakat setempat dan sepanjang mampu dikelola oleh masyarakat (Ndraha, 1990:72).

Pengertian pembangunan masyarakat tersebut, menunjukkan bahwa pembangunan masyarakat sesungguhnya merupakan upaya terorganisir secara

berkelompok yang memiliki kebutuhan yang sama, yaitu untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang lebih baik, khususnya bagi anggotanya.

a. Unsur Dasar Pembangunan Masyarakat

Ada empat unsur dasar pembangunan komunitas (masyarakat) menurut Dunham dalam Ndraha (1990:77):

1. Program Berencana
2. Pembangkitan tekad masyarakat untuk menolong diri sendiri dan tidak selalu bergantung pada pihak lain.
3. Bantuan teknis, termasuk personil peralatan dan dana.
4. Pemanduan berbagai keahlian untuk membangun komunitas.

Dari unsur dasar inilah peneliti ingin meneliti pada unsur poin ketiga yakni bantuan teknis. Dalam bantuan teknis, di jelaskan bahwa personil peralatan disini dimaksudkan adalah prasarana guna mendukung dalam pembangunan masyarakat dalam rangka kemiskinan. Apabila dikorelasikan dengan bantuan langsung masyarakat, bantuan pemavingan jalan merupakan bantuan yang bertujuan juga untuk membangun sarana dan pra sarana dalam meningkatkan pembangunan. Sedangkan dana yang dimaksud dalam unsur bantuan dana tersebut, yakni merupakan penyediaan bantuan modal untuk masyarakat dalam membangun kemandirian berusaha untuk keluar dari zona kemiskinan. Dalam bantuan langsung masyarakat PNPM Mandiri, hal ini ditunjukkan dalam bantuan bidang pemberdayaan masyarakat.

b. Pembangunan Masyarakat dalam Mengatasi Kemiskinan Pedesaan

Untuk mengatasi kemiskinan di pedesaan, di dalam teori pembangunan terdapat konsep *The Good Community and Copetency*. Konsep *The Good Community and Copetency* ini mengandung sembilan nilai, yaitu:

1. Setiap anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain secara aktif berdasarkan hubungan pribadi dan berkelompok.
2. Komunitas memiliki otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan mengurus kepentingannya sendiri secara bertanggungjawab.
3. Komunitas memiliki valibitas, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah sendiri.
4. Distribusi kekuasaan dilakukan secara merata, dimana setting setiap orang memiliki kesempatan yang sama, bebas memilih dan menyatakan kehendaknya.
5. Kesempatan yang luas untuk setiap anggota masyarakat dalam berpartisipasi aktif bagi kepentingan bersama.
6. Keberadaan komunitas memberi makna penting kepada anggotanya.
7. Adanya heterogenitas dan perbedaaan pendapat.
8. Pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat mungkin dan secepat mungkin bagi yang berkepentingan, dan
9. Adanya konflik dan managing konflik (Kusmayadi, 2012)

c. Model Konseptual Pembangunan Masyarakat

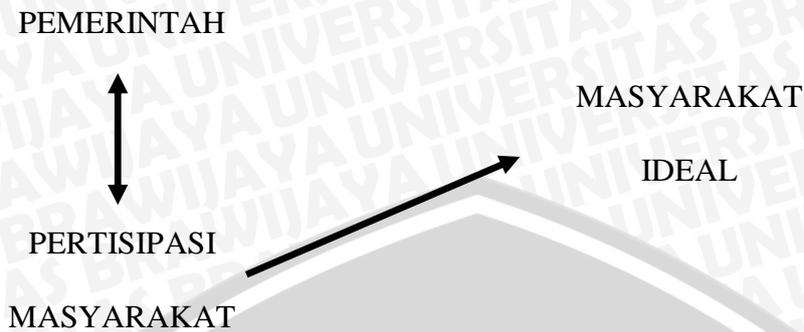
Korelasi antara peranan pemerintah dan partisipasi masyarakat tidak dapat dipisahkan dalam membantuk masyrakat ideal. Pemerintah diharapkan mampu memberikan fasilitas-fasilitas yang mampu membuat masyarakat ikut berpartisipasi dan berusaha mandiri sehingga membentuk masyarakat ideal. Dalam model konseptual pembangunan masyarakat definisi dari PBB tahun 1956, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1

Model Pembangunan Masyarakat

PERANAN





Sumber : Ndraha (1990:99)

d. Indikator Keberhasilan Pembangunan Masyarakat

Dalam sebuah definisi pembangunan yang telah dijelaskan, pembangunan memiliki tujuan, dan unsur unsur dalam mengatasi permasalahan demi mencapai tujuan pembangunan. Maka dari itu, diperlukan indikator keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan. Secara komulatif, indikator keberhasilan pembangunan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Sejauh mana kondisi taraf hidup masyarakat berhasil diperbaiki dan ditingkatkan
2. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desanya berhasil digerakkan
3. Sejauh mana kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri berhasil ditumbuhkan (Ndraha, 1990:110)

Dilihat dari sudut, pembangunan masyarakat, masyarakat dianggap dapat berfungsi sebagai subjek pembangunan yakni masyarakat mampu berkembang secara mandiri. Secara konseptual, masyarakat mandiri ialah masyarakat yang

mampu mengendalikan masa depannya sendiri. Konsep ini dapat dioprasionalkan menjadi beberapa indikator, yaitu:

1. Kemampuan Memelihara Aset, yakni kemampuan masyarakat untuk mengusahakan, memelihara atau merawat sumber asset, dan prasarana yang ada baik berbentuk fisik maupun non fisik.
2. Kemampuan Bangkit dari Keadaan, yakni kemampuan masyarakat untuk bangkit kembali dari keadaan jatuh atau mundur sebagai akibat kekeliruan yang pernah ditempuhnya.
3. Kemampuan Meningkatkan Asset, yakni kemampuan masyarakat untuk mengembangkan atau meningkatkan sumber, asset, atau peralatan yang ada.
4. Masyarakat Memberi respon Positif, yakni kemampuan masyarakat untuk memberi respon positif terhadap setiap perubahan sosial yang berlangsung (Ndraha, 1990:67).

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat apabila mengacu pada kata “*empowerment*” menurut Randy dan Rianto yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki masyarakat. Konsep pemberdayaan mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat), *community based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat) dan *community driven* (pemangunan yang diarahkan masyarakat atau pembenagunan yang digerakan masyarakat (dalam Mansur, 2012:53).

Pembangunan yang berpusat pada manusia merupakan suatu pendekatan yang memandang inisiatif dan kreativitas dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan (Soeharto, 1997:69). Melihat hal tersebut, penting untuk memahami konsep pembangunan yang berpusat pada manusianya. Disamping untuk mencapai tujuan pembangunan, masyarakat juga diikutkan dalam proses pembangunan.

Selain itu Ginanjar dalam Mubyarto (1997:180) juga mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan agenda utama kebijaksanaan dan strategi pembangunan nasional. Upaya yang dilakukan dalam hal ini mencakup tiga bidang, yakni:

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang.
- 2) Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat itu.
- 3) Melindungi kelompok ekonomi rakyat yang masih lemah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

2. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Untuk melihat bagaimana suatu pemberdayaan bisa dikatakan berhasil, maka diperlukan suatu indikator-indikator yang menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga apabila sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, maka dapat diketahui apakah indikator yang telah dirumuskan ini dapat tercapai atau masih belum maksimal dengan melihat hasil dari program pemberdayaan tersebut.

Schuler, Hashemi, dan Riley dalam Soeharto (2004:63) mengembangkan delapan indikator pemberdayaan.

- a) Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- b) Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak goreng, minyak tanah dan lain-lain). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- c) Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya poin di atas, individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- d) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara mandiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian lembu untuk ditanam, memperoleh kredit usaha.
- e) Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, perhiasan dari dia tanpa ijinnya, yang melarang mempunyai anak, atau melarang bekerja keluar rumah.
- f) Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya surat nikah dan hukum-hukum waris.
- g) Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seorang dianggap "berdaya" jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial atau terpisah dari pasangannya.
- h) Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangan.

D. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Menurut Chambers kemiskinan dianggap sebagai proses interaksi dari berbagai faktor yang muncul sebagai akibat dari situasi ketidakadilan, ketidakpastian, ketimpangan, dan ketergantungan dalam struktur masyarakat (dalam Suryono, 2004:100). Selain itu, kemiskinan menurut bank dunia (*world bank*), yakni:

Kemiskinan sebagai suatu keadaan kekurangan yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang di luar keinginan yang bersangkutan sebagai kejadian yang tidak dapat dihindari akibat tidak berdayanya kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya yang disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat kompleks yang berinteraksi satu sama lain (dalam Suryono, 2004:112).

Banyaknya konsep kemiskinan menganggap bahwa kemiskinan terjadi karena ketidakberdayaan orang tersebut dalam menghadapi situasi yang ada sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sudut pandang kemiskinan yang beragam Mardimin memberikan pengertian kemiskinan dari dua sudut pandang, yakni:

Kemiskinan mempunyai dua pengertian, yaitu dilihat dari aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Secara kualitatif, kemiskinan adalah suatu kondisi yang didalamnya hidup manusia tidak bermartabat manusia. Sedangkan secara kuantitatif, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana hidup manusia serba kekurangan atau tidak berharta benda (dalam Suryono, 2004:102).

2. Klasifikasi Kemiskinan

Dalam pengklasifikasian kemiskinan, menurut Sulistiyani (2004:29) kemiskinan dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk klasifikasi dasar dengan mengklasifikasikan berdasarkan standar tertentu, yakni:

- a) Berdasarkan perbandingan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan hal tersebut, kemiskinan dibagi menjadi dua, yakni:
 - 1) Kemiskinan Absolut, yaitu mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum.
 - 2) Kemiskinan relatif, yaitu mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum, tetapi secara relatif mereka berada di bawah rata-rata pendapatan masyarakat yang ada disekitarnya.
- b) Berdasarkan pembahasannya, kemiskinan diklasifikasikan lagi menjadi 3 (tiga) yakni:
 - 1) Kemiskinan Natural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh suatu kondisi keterbatasan secara alamiah yang dihadapi oleh suatu komunitas, sehingga sulit untuk melakukan perubahan.
 - 2) Kemiskinan Kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya. Budaya yang dimaksudkan budaya yang diyakini dan dikembangkan dalam suatu masyarakat sehingga menyebabkan proses pelestarian kemiskinan dalam masyarakat itu sendiri.
 - 3) Kemiskinan Struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor tertentu yang dibangun dan dikondisikan oleh manusia sehingga menyebabkan kerugian pada satu sisi.
- c) Berdasarkan pola waktu, yang dikemukakan oleh Sumodiningrat terbagi atas 4 (empat) kemiskinan, yakni:

- 1) Kemiskinan turun temurun (*persistent poverty*)
- 2) Kemiskinan yang mengikuti siklus ekonomi secara keseluruhan (*gyclical poverty*)
- 3) Kemiskinan musiman seperti yang dijumpai pada kasus-nelayan dan petani tanaman pangan (*seasonal poverty*)
- 4) Kemiskinan yang disebabkan oleh adanya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan (*accidental poverty*) (dalam Sulistiyani, 2004:31).

3. Faktor Penyebab Kemiskinan

Faktor penyebab kemiskinan dibagi menjadi dua yakni:

“Pertama, kemiskinan yang terjadi disebabkan oleh faktor-faktor eksternal atau faktor yang berada diluar jangkauan individu. Faktor ini secara kongkrit lebih bersifat hambatan, kelembagaan atau struktur yang memang bisa menghambat seseorang untuk meraih kesempatan-kesempatannya. Kedua, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor internal yang berasal dalam diri seseorang atau lingkungannya. Kaum konservatif penganut pandangan ini melihat bahwa kemiskinan jenis ini terjadi sebagai akibat dari nilai-nilai dan kebudayaan yang dianut sekelompok masyarakat. Jadi tidak bermula dari struktur sosial tetapi berasal dari karakteristik khas orang-orang miskin itu sendiri” (Sumodiningrat, 1997:15)

4. Program Pengentasan Kemiskinan

Pada dasarnya, pemerintah sudah melakukan penanggulangan kemiskinan sejak pembangunan lima tahun masa orde baru yang menjangkau seluruh pelosok tanah air. Upaya ini mendapatkan perkembangan yang positif. Akan tetapi, krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah menimbulkan lonjakan pengangguran dan

meningkatkan kemiskinan. Di sisi lain menyadarkan kita bahwa pendekatan yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan perlu ditinjau kembali.

Dasar hukum utama program penanggulangan kemiskinan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 34 UUD 1945 yang terdiri dari 4 ayat, dicantumkan secara jelas landasan program kemiskinan sebagai berikut:

Ayat 1 : Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Ayat 2 : Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Ayat 3 : Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Ayat 4 : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pada ayat 1 (satu) pasal 34 UUD 1945 digambarkan bahwa program bantuan untuk anak-anak terlantar dan fakir miskin bukanlah bantuan yang sifatnya sementara, atau waktu dekat akan tetapi bantuan diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan merangsang kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup.

Hal ini memunculkan paradigma baru dalam penanggulangan kemiskinan, yakni perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui kelompok masyarakat. Harapannya pemberdayaan sudah ditekankan pada kelompok masyarakat bukan lagi individual dan setiap upaya pemberdayaan baik yang

dilakukan pemerintah maupun kelompok peduli masyarakat miskin seharusnya dipandang sebagai stimulus untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Melihat hal tersebut, maka dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan diharapkan memenuhi lima hal pokok sebagai berikut:

- a) Bantuan dana sebagai modal usaha.
- b) Pembangunan pra sarana sebagai pendukung sebagai pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- c) Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat.
- d) Pelatihan bagi aparat dan masyarakat.
- e) Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat (Sumodiningrat, 1997:7).

Dalam program pemerintah ini, peneliti mengambil program PNPM Mandiri untuk mengatasi kemiskinan. Disini PNPM mempunyai tujuan meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. PNPM Mandiri merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan.

E. PNPM Mandiri

1. Pengertian PNPM

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan (Pedoman Umum PNPM Mandiri 2007/2008).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

2. Tujuan PNPM

a) Tujuan Umum

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

b) Tujuan Khusus

- 1) Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- 2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.
- 3) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor)
- 4) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- 5) Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- 6) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- 7) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. (Pedoman Umum PNPM Mandiri 2007/2008)

3. Pendekatan PNPM

Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

- a) Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program.
- b) Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.
- c) Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.
- d) Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.
- e) Melalui proses pemberdayaan yang terdiri dari atas pembelajaran, kemandirian dan keberlanjutan. (Pedoman Umum PNPM Mandiri 2007/2008)

4. Kategori Program PNPM

Pada Tahun 2008, pada PNPM Mandiri ditambahkan program-program yang berbasis pemberdayaan masyarakat, sehingga PNPM Mandiri selain PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan ditambah dengan beberapa program lainnya:

- a) PNPM-P2DTK (Program Pembangunan Daerah Khusus dan Tertinggal, dikelola oleh Kementerian PDT, mendapat pinjaman dari Bank Dunia.
- b) PNPM- PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan) yang pada tahun 2009 menjadi RIS-PNPM (Rural Infrastructure Services), dikelola oleh Ditjen. Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, dengan pinjaman dari ADB.
- c) PNPM-PISEW/RISE (Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah/Rural Infrastructure for Social and Economic Activities), dikelola oleh Ditjen. Cipta Karya, Dept. Pekerjaan Umum, Ditjen. Bina Pembangunan Daerah, dan Bappenas, dengan pinjaman dari JICA/ JBIC. (Pedoman Umum PNPM Mandiri 2007/2008)

Program dalam PNPM Mandiri ini merupakan Program Inti (Core) artinya Program yang membangun Sistem, proses dan prosedur serta wadah bagi pemberdayaan masyarakat di setiap desa. Sejak Tahun 2008, maka dikembangkan pula PNPM yang sifatnya sektoral, dalam artian tidak sepenuhnya open menu namun sudah terfokus pada sektor tertentu, yaitu:

- a) PNPM PUAP (Program Usaha Agribisnis Perdesaan), dikelola oleh Kementerian Pertanian.
- b) PNPM-KP (Kelautan dan Perikanan), dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- c) PNPM – Pariwisata, dikelola oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- d) PNPM-Permukiman, dikelola oleh Kementerian Perumahan Rakyat. (Pedoman Umum PNPM Mandiri 2007/2008)

Selain itu juga dikembangkan skema-skema PNPM yang sifatnya terfokus pada kelompok sasaran tertentu dan ditambahkan (on-top) pada PNPM inti yang dikelola oleh K/L pengelolanya, yaitu:

- a) PNPM Generasi Sehat Cerdas (PNPM untuk meningkatkan Kesehatan Ibu dan anak dan pendidikan keluarga) dikelola oleh Ditjen. PMD, Kemendagri, mendapat bantuan hibah dari Ausaid/PSF.
- b) PNPM Hijau (Green KDP), ditambahkan pada lokasi PNPM Perdesaan, dikelola oleh Ditjen. PMD, Depdagri, mendapat pendanaan dari Multidonor PNPM Support Facility (PSF).
- c) PNPM-Peduli, PNPM yang diperuntukkan bagi Kelompok masyarakat rentan (korban trafficking, PSK, transgender, anak yatim, para janda kepala keluarga, penyandang cacat, KAT, penderita HIV/AIDS, penderita Lepra, pecandu narkoba, kelompok marginal lainnya), dikelola oleh LSM yang diseleksi, mendapat pendanaan dari Multidonor PSF. (Pedoman Umum PNPM Mandiri 2007/2008)

5. Komponen Program PNPM

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut:

a) Pengembangan Masyarakat.

Komponen Pengembangan Masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai.

Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

b) Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.

c) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Komponen Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya.

d) Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program. (Pedoman Umum PNPM Mandiri 2007/2008)

6. BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) PNPM

Jenis Bantuan di Tingkat Masyarakat Bantuan untuk masyarakat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan diwujudkan dalam bentuk bantuan pendampingan dan bantuan dana.

a) Bantuan Pendampingan

Bantuan pendampingan ini diwujudkan dalam bentuk penugasan konsultan dan fasilitator beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat agar mampu merencanakan dan melaksanakan program masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di kelurahan masing masing.

b) Bantuan Dana

Bantuan dana diberikan dalam bentuk dana BLM (dana bantuan langsung masyarakat). BLM ini bersifat stimulan dan sengaja disediakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih dengan mencoba melaksanakan sebagian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Dana bantuan Langsung masyarakat dapat digunakan untuk kegiatan kegiatan yang termasuk dalam komponen-komponen kegiatan lingkungan, komponen kegiatan sosial, dan kompoonen kegiatan keuangan. Berikut merupakan gambaran penggunaan dana bantuan langsung masyarakat.

Tabel 1 Gambaran Penggunaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

| Komponen Kegiatan | Sifat Kemanfaatan Kegiatan | Contoh Jenis Kegiatan yang dibiayai BLM | Status Pemanfaatan dana BLM |
|--------------------------|--|--|------------------------------------|
| Komponen Lingkungan | Kegiatan yang secara langsung memberikan | Pembangunan sarana & prasarana perumahan dan | Sebagai dana simultan |



| | | | |
|-----------------|--|---|-----------------------|
| | dampak/manfaat secara kolektif pada peningkatan akses melalui peningkatan kualitas lingkungan & permukiman yang sehat, tertib, aman dan teratur. | permukiman, baik kepentingan masyarakat umum, dan/atau kepentingan warga miskin (rumah kumuh, dll). | |
| Komponen Sosial | <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang secara langsung mampu menumbuhkan kembali modal sosial di masyarakat seperti terjalannya kembali budaya gotong royong, tolong menolong antar warga, integritas, etos kerja, kewirausahaan, dll. Seluruh ketentuan dalam pelaksanaan | <ul style="list-style-type: none"> Pelatihan KSM untuk pengembangan kapasitas/penguatan organisasi, Penyiapan dan penciptaan peluang usaha melalui pelatihan dan praktik ketrampilan usaha bagi warga miskin yang belum produktif. | Sebagai dana simultan |

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| | kegiatan sosial ini harus sesuai menurut kesepakatan warga dan tertuang dalam kebijakan LKM. | <ul style="list-style-type: none"> • Program sosial yang sifatnya bantuan yang diupayakan berkelanjutan seperti program peningkatan gizi balita, program penuntasan wajib belajar 9 tahun, dll. | |
| Komponen Ekonomi | Kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat dan peningkatan pendapatan bagi individu/ keluarga maupun kelompok. | Pengembangan modal ekonomi keluarga, yang bermanfaat langsung bagi peningkatan pendapatan keluarga miskin. | Sebagai pinjaman kepada KSM dan harus dikembalikan kepada UP (unit pengelola). |

Sumber: Departemen Pekerjaan Umum, 2008

Dalam pelaksanaan komponen-komponen program tersebut di atas, khususnya komponen BLM, harus memperhatikan aspek peruntukan dana dan daftar larangan (negative list) yang telah ditetapkan oleh masing-masing program.

Pengaturan penganggaran dan penyaluran dana BLM menggunakan mekanisme yang mendukung pembangunan partisipatif, antara lain melalui:

- a) BLM yang berasal dari APBN dan APBD menggunakan rekening bagian anggaran non sektor.
- b) Penyaluran dana BLM ini langsung ke rekening masyarakat sesuai dengan usulan yang diajukan.
- c) Satuan Kerja bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem administrasi dan realisasi pencairan DIPA yang dikelolanya.
- d) Dana BLM dikelola secara mandiri oleh masyarakat.
- e) Penganggaran untuk kegiatan-kegiatan atau program-program pemberdayaan, khususnya komponen dana BLM dapat diperlakukan sebagai kegiatan dan anggaran yang bersifat lebih dari satu tahun.

Pengaturan penganggaran dan penyaluran dana untuk komponen pengembangan masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintahan dan pelaku lokal, bantuan pengelolaan dan pengembangan program mengikuti ketentuan dan mekanisme pengelolaan program.

Pemanfaatan anggaran sektoral dan daerah untuk program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat menggunakan aturan berbasis kinerja dengan tetap mengedepankan sinkronisasi anggaran antar sektor dan masyarakat melalui proses perencanaan partisipatif.

Untuk menjamin keterpaduan dan sinkronisasi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat beserta anggarannya harus dikoordinasikan dan mendapat persetujuan dari Tim Koordinasi Nasional atau Provinsi atau Kabupaten/Kota, sesuai jenjang pemerintahan, sebelum pengesahan DPRD/DPR (Pedoman Umum PNPM Mandiri 2007/2008)

F. Korelasi Antar Hubungan Kajian Pustaka

Dari pengertian mengenai konsep pembangunan masyarakat dapat di petakan menjadi dua elemen dasar didalam pembangunan masyarakat, yakni:

1. Partisipasi masyarakat itu sendiri dalam rangka usaha mereka untuk memperbaiki tarap hidup mereka.

2. Bantuan dan pelayanan teknik yang bermaksud membangkitkan prakarsa, tekad untuk menolong diri sendiri dan kesediaan untuk menolong orang lain, dari pemerintah.

Dengan elemen dasar tersebut, peneliti dapat menggunakannya sebagai dasar untuk melihat suatu kebijakan. Salah satu kebijakan publik yang sedang dilaksanakan pemerintah saat ini adalah PNPM Mandiri.

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dengan pengertian tersebut, PNPM Mandiri merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan masyarakat dalam pengetasan kemiskinan. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa) atas kehidupannya (Soeharto, 2007).

Tujuan umum PNPM adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka sudah seharusnya program-program dalam PNPM Mandiri (khususnya program Bantuan Langsung Masyarakat dan Pemavingan jalan) berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan sesuai dengan indikator pemberdayaan masyarakat.

G. Hipotesis

Berdasarkan penelitian ini, melalui pemecahan masalah dengan mengumpulkan banyak informasi melalui penelitian, maka diperlukan adanya hipotesis. Hipotesis yakni alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi masalah yang diajukan dalam penelitian. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan dalam penelitian. Dengan kedudukan itu maka hipotesis dapat

berubah menjadi kebenaran, tetapi juga dapat tumbang sebagai kebenaran (Arikunto, 2006:55). Berikut merupakan hipotesis yang dapat dijadikan hipotesis dalam penelitian ini, yakni:

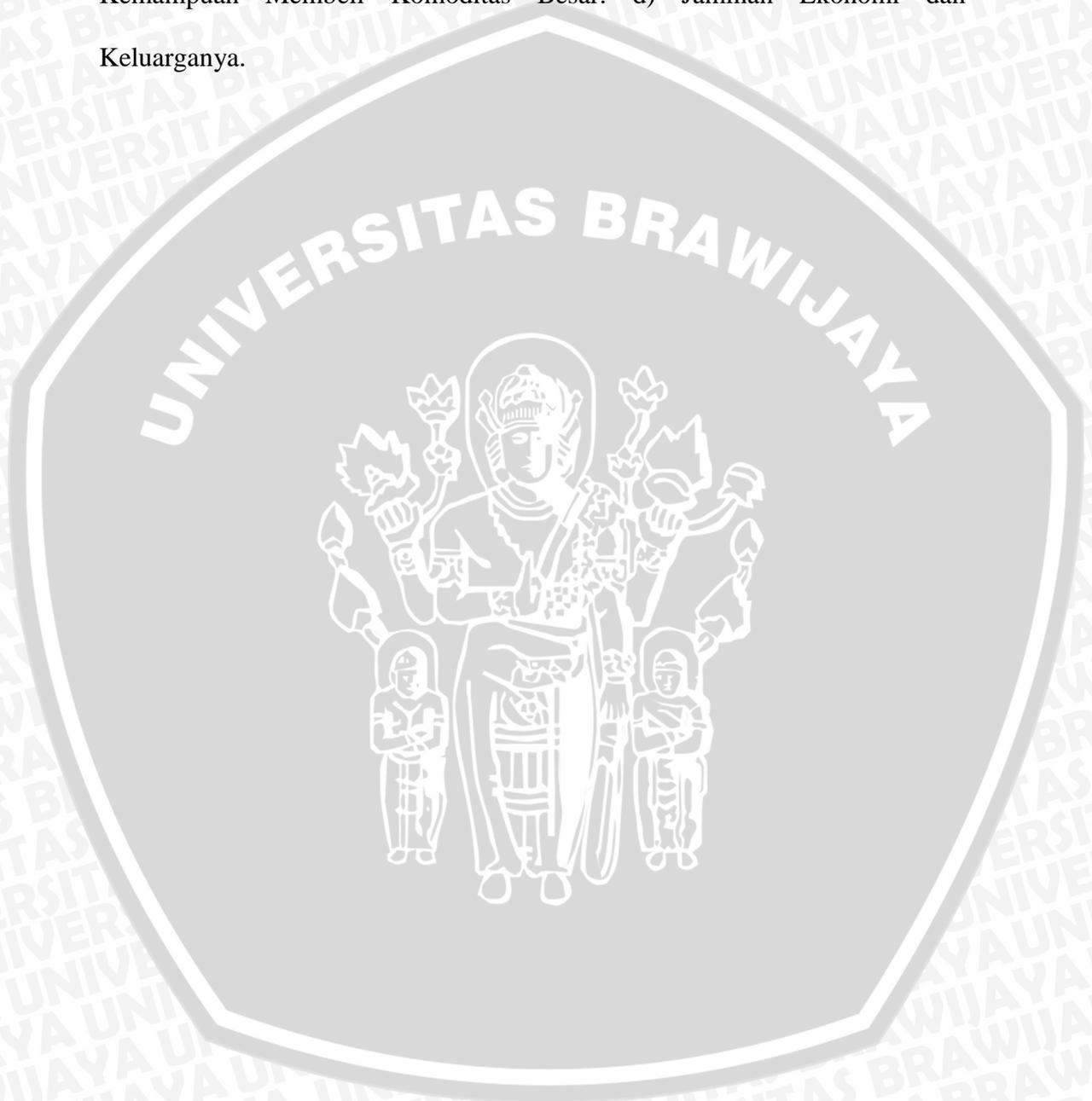
H_a: 1. Diduga ada pengaruh secara simultan antara variabel Dana Bantuan Langsung Masyarakat (X₁) dan Pemavingan Jalan (X₂) terhadap pengentasan kemiskinan (Y) melalui indikator Pemberdayaan Masyarakat, yakni a) Kebebasan Mobilitas. b) Kemampuan Membeli Komoditas Kecil. c) Kemampuan Membeli Komoditas Besar. d) Jaminan Ekonomi dan Keluarganya.

2. Diduga ada pengaruh secara parsial antara variabel Dana Bantuan Langsung Masyarakat (X₁) dan Pemavingan Jalan (X₂) terhadap pengentasan kemiskinan (Y) melalui indikator Pemberdayaan Masyarakat, yakni a) Kebebasan Mobilitas. b) Kemampuan Membeli Komoditas Kecil. c) Kemampuan Membeli Komoditas Besar. d) Jaminan Ekonomi dan Keluarganya.

H₀: 1. Diduga tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel Dana Bantuan Langsung Masyarakat (X₁) dan Pemavingan Jalan (X₂) terhadap pengentasan kemiskinan (Y) melalui indikator Pemberdayaan Masyarakat, yakni a) Kebebasan Mobilitas. b) Kemampuan Membeli Komoditas Kecil. c) Kemampuan Membeli Komoditas Besar. d) Jaminan Ekonomi dan Keluarganya.

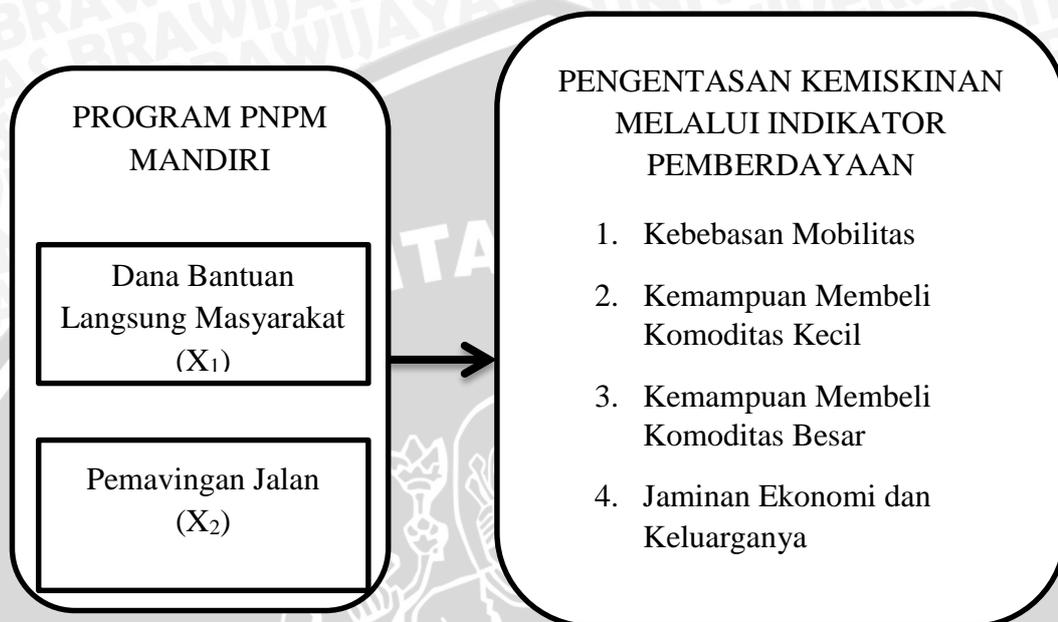
2. Diduga tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel Dana Bantuan Langsung Masyarakat (X₁) dan Pemavingan Jalan (X₂) terhadap pengentasan

kemiskinan (Y) melalui indikator Pemberdayaan Masyarakat, yakni a) Kebebasan Mobilitas. b) Kemampuan Membeli Komoditas Kecil. c) Kemampuan Membeli Komoditas Besar. d) Jaminan Ekonomi dan Keluarganya.



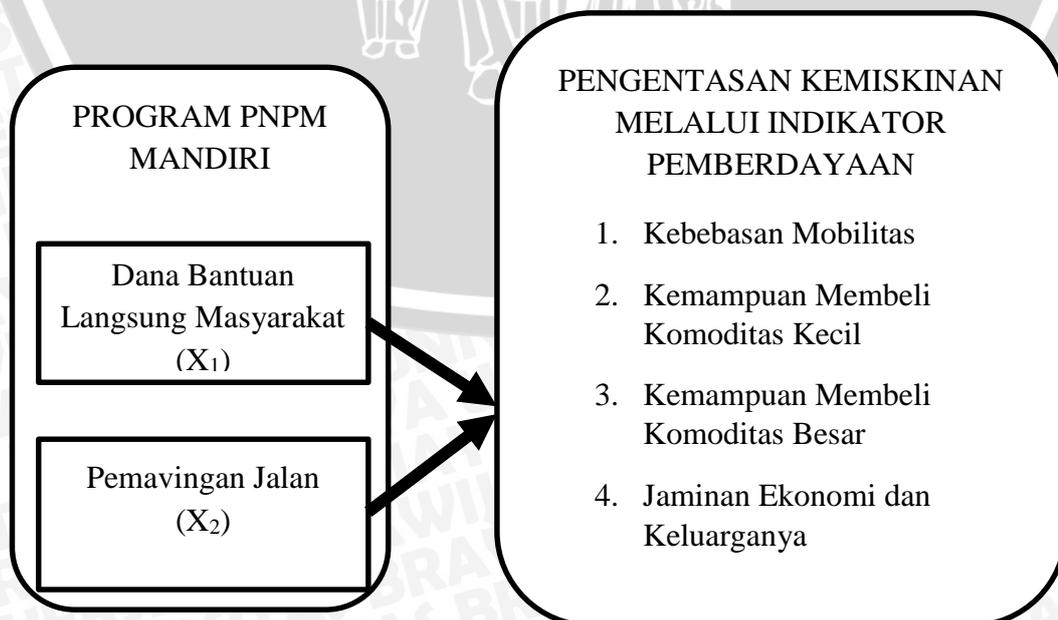
Gambar 2

Model Hipotesis secara Simultan



Gambar 3

Model Hipotesis secara Parsial



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan metode penelitian yang tepat sehingga diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.

Metode Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2008:13).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis regresi linier berganda. Metode regresi adalah metode yang digunakan untuk melihat pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Ada juga yang menyebutkan bahwa analisis regresi merupakan metode analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis data dan mengambil kesimpulan yang bermakna tentang hubungan ketergantungan variabel terhadap variabel lainnya (Dapper and Smith, 1992). Penggunaan metode regresi linier berganda dalam penelitian ini untuk melihat pengaruh variabel dana bantuan bidang pemberdayaan masyarakat (X_1) dan variabel Bantuan Dana Pendampingan (X_2) terhadap pengentasan kemiskinan (Y) baik secara parsial maupun simultan. Metode ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan atau

penelitian penjelasan (*explanatory research*), karena memberikan gambaran tentang variabel penelitian dan menjelaskan pengaruh yang terjadi antara variabel-variabel penelitian dan kemudian menguji hipotesis yang dirumuskan sebelumnya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi kabupaten Tulungagung.

Ada beberapa pertimbangan memilih lokasi tersebut diantaranya :

1. Tulungagung merupakan kabupaten kedua setelah kabupaten sidoarjo yang memiliki tingkat kemiskinan paling rendah yakni 7,45% kemudian kabupaten Tulungagung dengan 10,64% (BPS, 2011).
2. Menurut RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan BPS (Badan Pusat Statistik) provinsi Jawa Timur, Tulungagung adalah salah satu dari dua jenis perkotaan kecil yang memiliki angka terendah dibawah garis kemiskinan nasional, yang kemudian diikuti perkotaan Ponorogo.

C. Variabel dan Pengukuran

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian dapat diartikan sebagai objek pengamatan penelitian atau faktor yang memiliki peran dalam peristiwa atau fenomena fenomena yang akan diteliti. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Variabel yang mempengaruhi atau variabel bebas (independen variabel), yaitu: Dana Bantuan Langsung Masyarakat (X_1) dan Bantuan Dana Pendampingan (X_2).

- b) Satu variabel yang dipengaruhi atau variabel yang terikat (dependen variabel), yaitu: angka Kemiskinan (Y).

Untuk menyamakan pemahaman terhadap variabel baik itu variabel dependen maupun independen dalam penelitian kemiskinan di daerah Kabupaten Tulungagung, maka perlu suatu definisi operasional variabel, yaitu:

- a) Kemiskinan (Y)

Kemiskinan sebagai suatu keadaan kekurangan yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang di luar keinginan yang bersangkutan sebagai kejadian yang tidak dapat dihindari akibat tidak berdayanya kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya yang disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat kompleks yang berinteraksi satu sama lain (dalam Suryono, 2004:112).

- b) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (X_1)

Bidang ini disediakan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berlatih dengan mencoba melaksanakan sebagian rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan. Dana bantuan Langsung masyarakat dapat digunakan untuk kegiatan kegiatan yang termasuk dalam komponen-komponen kegiatan lingkungan, komponen kegiatan sosial, dan kompoonen kegiatan keuangan yang memberikan efek secara langsung.

- c) Dana Pendampingan (X_2)

Bantuan pendampingan ini diwujudkan dalam bentuk gagasan untuk proses pembangunan prasana. Pembangunan prasarana yang dimaksud hal ini ialah

Bantuan Dana Pendampingan yang ditujukan untuk meningkatkan pembangunan atau perbaikan prasarana desa atau fasilitas desa/kelurahan. Pembangunan sarana & prasarana seperti Bantuan Dana Pendampingan diharapkan dapat digunakan untuk memberikan dampak/manfaat secara kolektif pada peningkatan akses melalui peningkatan kualitas lingkungan & permukiman yang sehat, tertib, aman dan teratur, baik kepentingan masyarakat umum, dan/atau kepentingan warga miskin.

1. Definisi Operasional

Tabel 2 Konsep, Variabel, Indikator dan Item

| No | Konsep | Variabel | Indikator | Item |
|----|--|--|---|---|
| 1. | Program Nasional Pembangunan Masyarakat (PNPM) Mandiri | Dana Bantuan Langsung Masyarakat (X ₁) | 1. Kualitas Dana Bantuan Langsung Masyarakat 2. Kuantitas Dana Bantuan Langsung Masyarakat | a) Kualitas Pelayanan terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat dalam Pencairan dana bantuan Langsung Masyarakat. b) Kuantitas Jumlah Pendapatan yang diperoleh anggota terhadap Kelompok Swadaya Masyarakat dalam Pencairan dana |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>bantuan Langsung Masyarakat.</p> <p>c) Dampak Pencairan dana bantuan Langsung Masyarakat dalam meningkatkan partisipasi dan memberikan perubahan di masyarakat.</p> |
| | <p>Dana Pendampingan (X₂)</p> | <p>1. Usulan pembangunan prasarana jalan (Pavingisasi Jalan)</p> | <p>a) Manfaat Langsung Bagi Masyarakat Miskin</p> <p>b) Bila tidak dibangun kondisi akan semakin buruk dan dalam waktu dekat merugikan masyarakat miskin.</p> <p>c) Bila dibangun akan berdampak sangat signifikan terhadap peningkatan perekonomian dan</p> |

| | | | | |
|----|------------------------|---|---|--|
| | | | | kualitas hidup masyarakat miskin. |
| 2. | Pengentasan kemiskinan | Kemiskinan (Y) di Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung | Pengentasan Kemiskinan Melalui Indikator Pemberdayaan 1. Kebebasan Mobilitas 2. Kemampuan Membeli Komoditas Kecil 3. Kemampuan Membeli Komoditas Besar 4. Jaminan Ekonomi Dan Keluarganya | a) Kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya b) Kemampuan individu untuk membeli barang barang kebutuhan keluarga sehari-hari. c) Kemampuan individu untuk membeli barang barang sekunder atau tersier. |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | d) Kepemilikan rumah, tanah, aset produktif, dan tabungan |
|--|--|--|--|---|

Sumber: diolah peneliti, 2013

2. Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur, sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dari pertanyaan tersebut dapat diberi skor (Sugiyono, 2011:92). Untuk itu jawaban beserta skor dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sangat Setuju dengan skor 4
- b. Setuju dengan skor 3
- c. Tidak Setuju dengan skor 2
- d. Sangat Tidak Setuju dengan skor 1

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011:80). Dengan melihat definisi tersebut, populasi merupakan luas cakupan keseluruhan yang akan dianalisis dalam penelitian ini. Berdasarkan populasi penelitian ini adalah Jumlah penduduk miskin di kelurahan/desa Karangrejo kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung sebesar 499KK (1445 jiwa).

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2010:174). Berdasarkan pendapat Sugiyono (2010:116), bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Tujuan pengambilan sampel ini untuk memudahkan peneliti jika populasi yang diteliti jumlahnya besar.

Untuk menentukan ukuran sampel dengan tingkat kesalahan yang ditetapkan adalah 10% memakai rumus slovin yang dikutip oleh Husein Umar (2005:146), yaitu:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

N = ukuran populasi

n = ukuran sampel

e = persentasi kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir (10%).

3. Teknik Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel didasarkan pada rumus Slovin dengan perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1445}{1 + (1445)(0,1)^2}$$

$$n = \frac{1445}{1 + 14,45}$$

$$n = \frac{1445}{15,45}$$

$$n = 93,527508 \longrightarrow n = 93 \text{ (Pembulatan)}$$

Jadi pengambilan sampel untuk penduduk miskin di desa Karangrejo kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung yang akan diambil sebagai responden sebesar 93 jiwa.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber yang dapat dipercaya akan membantu proses penelitian dan mempermudah dalam menganalisis setiap permasalahan. Adapun sumber datanya adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti yang berasal langsung dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran angket kepada sumber data primer yang telah ditentukan.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain seperti lembaga pengumpul data, yang digunakan untuk mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa artikel, jurnal pelayanan publik dan internet untuk memberikan landasan bagi perumusan hipotesis dan pengukuran kuesioner.

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan:

a) Kuisoner

Pengumpulan data dengan menyebarkan angket tertutup, dimana responden memilih jawaban yang telah disediakan oleh peneliti. Data yang

diperoleh dari teknik ini adalah data tentang faktor faktor mempengaruhi kemiskinan.

b) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati atau mengobservasi orang atau peristiwa dalam lingkungan kerja dan mencatat informasi (Sekaran, 2006:324). Dalam teknik observasi atau pengamatan ini, peneliti mengamati Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung untuk memperoleh gambaran umum serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berkaitan dengan bantuan langsung masyarakat PNPM Mandiri.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dan juga penelitian yang ingin dicapai, maka ada beberapa alat analisis yang digunakan:

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Menurut Arikunto (2010:211) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Dengan melihat hal tersebut, maka penting sebuah pengujian data untuk melihat kesahihan atau kevalidan data yang diperoleh melalui uji validitas ini.

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Valid tidaknya suatu item dengan membandingkan indeks korelasi produk momen (r hitung) dengan nilai kritis/probabilitasnya. Dalam penelitian ini pengujian validitas dilakukan dengan program SPSS.

Uji Reliabilitas

Menurut Sugiono (2010:221) Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang dapat dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya untuk digunakan akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila data memang sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kali pun diambil, tetap akan sama.

2. Uji Asumsi Klasik

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier Berganda dengan Metode Kuadrat Terkecil (Ordinary Least Square-OLS). Ada beberapa asumsi yang mendasari analisis ini, antara lain:

a) Uji Multikolinearitas

Multikoliniearitas atau kolinearitas ganda adalah suatu keadaan terdapatnya hubungan yang erat antara dua atau lebih variabel penjelas atau bebas. Kolinearitas ganda menyebabkan kesulitan dalam

membedakan pengaruh secara individual terhadap variabel terikat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Untuk menguji gangguan multikolinearitas dengan melihat *variance inflation factor* (VIF) atau korelasi pearson antara variabel-variabel bebas. Pada uji kolinearitas ganda ini, diharapkan nilai $VIF < 10$ atau korelasi pearson antara variabel-variabel bebas signifikan ($P\text{-value (sign)} < \alpha = 5\%$ atau 1%), sehingga asumsi multikolinearitas tidak terpenuhi (Drapper dan Smith, 1992).

b) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas yaitu suatu keadaan dimana varians dari suatu pengamatan ke pengamatan lain berbeda untuk setiap variabel. Untuk mengetahuinya, jika pada *scatter plot* tidak tampak adanya suatu pola tertentu pada sebaran data dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005)

c) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah pengujian asumsi residual yang memiliki korelasi pada periode ke-t dengan periode sebelumnya (t-1). Harapannya, model regresi linier berganda memiliki residual yang sifat tidak ada korelasi. Statistik uji yang sering dipergunakan adalah uji Durbin-Watson. Apabila nilai Durbin-Watson berada di sekitar angka 2, berarti model regresi aman dari kondisi Autokorelasi.

d) Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian asumsi residual yang berdistribusi normal. Asumsi ini harus terpenuhi untuk model regresi linier yang baik. Uji normalitas dilakukan pada nilai residual mode. Asumsi normalitas terpenuhi ketika $P\text{-value (sign)} > \alpha$ dengan nilai α ditentukan sebesar 5% atau 1% (Drapper dan Smith, 1992).

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih dalam ilmu statistik, dengan melihat pengaruh setiap variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Sesuai dengan banyaknya variabel yang diteliti, sebagaimana yang tertulis dalam rumus dasar regresi sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_n X_n + e$$

Keterangan:

| | |
|------------------------------------|---|
| Y | = Variabel dependen |
| β_0 | = Bilangan konstanta |
| $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ | = Koefisien regresi setiap variabel bebas |
| X_1, X_2, \dots, X_n | = Variabel Bebas |
| e | = Kesalahan Pengganggu (<i>error disturbance</i>) |

4. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh peneliti seperti lokasi penelitian, data yang diteliti, serta hasil hasil penelitian yang ditabulasikan ke dalam tabel frekuensi dan kemudian

membahas data yang telah diolah tersebut secara deskriptif. Indikator dalam pendeskripsian ini yakni dengan pemberian angka, baik dalam jumlah maupun prosentase.

G. Teknik Penarikan Kesimpulan

1. Uji R^2 (Keofisien Determinasi)

Uji R^2 digunakan untuk mengetahui ketepatan model yang digunakan dimana ketentuannya adalah $0 < R^2 < 1$. Jadi jika nilai R^2 semakin mendekati 1, maka model yang digunakan tersebut dapat atau layak digunakan untuk penelitian selanjutnya.

2. Uji F (Uji Simultan)

Uji F dikatakan sebagai kata lain dari korelasi simultan yaitu hubungan seberapa berpengaruh antara X keseluruhan terhadap Y. Dalam Uji F ini ketentuannya adalah $< 0,05$. Jadi apabila hasilnya semakin mendekati 0,05 artinya variabel X semakin signifikan terhadap Y. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dan F_{tabel} . Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak yang berarti variabel X keseluruhan yang diuji bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Namun jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima, yang artinya variabel X keseluruhan yang di uji bersama-sama secara serentak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y.

3. Uji t (Uji Parsial)

Uji-t digunakan untuk menguji secara parsial untuk mengukur tingkat signifikansi antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji ini juga berguna

untuk mengetahui variabel bebas manakah yang paling berpengaruh diantara variabel lainnya.

Pengambilan keputusan diambil berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Sedangkan jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, berarti H_1 ditolak dan H_0 diterima. Pengambilan keputusan juga bisa dilakukan dengan melihat nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansi $t > \alpha$ (0,05), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dan apabila nilai signifikansi $t < \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

4. *Standardized Coefficient*

Standardized Coefficient adalah metode pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui variabel bebas (X) mana yang dominan terhadap variabel terikat (Y). Untuk mengetahui variabel mana yang dominan terhadap variabel terikat dilihat dari besar kecilnya nilai *standardized coefficient* pada uji-t atau uji parsial. Sifat *coefficient* ada 2 jenis, yakni positif dan negatif. *Coefficient* positif adalah apabila hubungan X dan Y sejajar. Sedangkan *coefficient* negatif terjadi apabila hubungan X dan Y berbanding terbalik. Kesimpulan dari pengujian secara parsial dengan mengidentifikasi koefisien variabel yang paling besar maka menunjukkan variabel yang berpengaruh dominan terhadap Y.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

H. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Desa Karangrejo

Desa Karangrejo merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung provinsi Jawa Timur dengan kondisi masih banyaknya masyarakat miskin di desa tersebut, sehingga perlu adanya bantuan dari pemerintah guna memberikan *stimulus* agar masyarakatnya lebih mandiri. Dengan kondisi masyarakat pedesaan di desa Karangrejo sangatlah kental yaitu dengan masih terlihat jelasnya budaya gotong royong, kerja bakti, sambatan/rewang yang masih sangat mewarnai kehidupan sehari-hari, akan dirasa tidak sulit dalam menerapkan program pembangunan bantuan dari pemerintah.

Dengan adanya PNPM P2KP diharapkan akan membantu dengan pembangunan dan pengembangan desa baik dalam segi fisik/ lingkungan, social dan terutama ekonomi. Dengan berjalanya program bantuan khususnya dalam bantuan langsung masyarakat dan Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan dari PNPM di desa Karangrejo, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Sehingga deengan adanya bantuan PNPM dapat meningkatkan kenyamanan dan perekonomian masyarakat desa Karangrejo.

2. Kondisi Geografis

Desa Karangrejo, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung Propinsi Jawa Timur. Desa Karangrejo dusun berdasarkan wilayah administrasinya terbagi atas 3 (tiga) dusun yaitu dusun Kandenan, dusun Kedungsingkil dan dusun Karangrejo, serta memiliki 8 RW dan 32 RT. Desa ini terletak di dataran yang memiliki luas wilayah 212,90 ha dengan ketinggian 90 m di atas permukaan laut dan beriklim tropis.

Sedangkan dilihat dari batas-batas wilayahnya desa Karangrejo kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung provinsi Jawa Timur berbatasan dengan:

- Sebelah barat : Desa Wajak Lor, Kec. Boyolangu
- Sebelah timur : Desa Doroampel, Kec. Sumbergempol
- Sebelah utara : Desa Tanjungsari, Kec. Boyolangu
- Sebelah selatan : Desa Junjung, Kec. Sumbergempol

3. Kondisi Demografi

Penduduk desa Karangrejo berjumlah 4.464 jiwa, dengan komposisi penduduk 2338 nya adalah perempuan dan 2126 laki-laki. Sedangkan jumlah penduduk dewasa sebanyak 3090, yang terdiri dari 1350 pria dan 1700 wanita. Penduduk kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani/peternak, pedagang, penjahit konveksi, PNS, dll. Jumlah penduduk miskin di kelurahan/desa ini sebesar 499KK (1445 jiwa). Sedangkan dilihat dari segi pendidikan kebanyakan warga disini adalah lulusan SMA dan SMP.

Jumlah penduduk sebagian besar adalah beragama Islam (\pm 99%) menyebabkan banyaknya lembaga non formal masyarakat dalam bentuk forum keagamaan berupa tahlil/yasinan atau lainnya.

4. Karakteristik Responden

Dari hasil penyebaran kuesioner kepada sebagian mahasiswa yang berjumlah 93 responden, maka dapat diperoleh gambaran karakteristik responden berdasarkan usia responden dan jenis kelamin responden. Gambaran karakteristik responden secara rinci adalah sebagai berikut :

a. Jenis Kelamin Responden

Data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Kelamin

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Responden (Senioritas) | Persentase (%) |
|-----|---------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | Laki – laki | 47 | 50,54 |
| 2 | Perempuan | 46 | 49,46 |
| | Jumlah | 93 | 100 |

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa responden yang memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 47 responden atau 50,54%, sedangkan perempuan sebanyak 46 responden atau 49,64%. Berdasarkan data tersebut, maka responden

yang paling banyak adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 47 orang atau 50,54%.

I. Gambaran Variabel Yang Diteliti

1. Distribusi Frekuensi Variabel Dana Bantuan Langsung Masyarakat (X1)

Variabel Dana Bantuan Langsung Masyarakat terdapat enam item pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Variabel Dana Bantuan Langsung Masyarakat (X1)

| Item | SS | | S | | TS | | STS | | Jumlah | | Rata-rata |
|----------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------|-----|-----------|
| | f | % | f | % | f | % | f | % | Jumlah | % | |
| X1.1(Kualitas pelayanan) | 1 1 | 11.8 3 | 3 0 | 32.2 6 | 4 9 | 52.6 9 | 3 3 | 3.23 | 93 | 100 | 2.53 |
| X1.2 (Kualitas pelayanan) | 1 0 | 10.7 5 | 3 1 | 33.3 3 | 4 7 | 50.5 4 | 5 5 | 5.38 | 93 | 100 | 2.49 |
| X1.3 (Kuantitas pelayanan) | 1 4 | 15.0 5 | 3 0 | 32.2 6 | 3 8 | 40.8 6 | 1 1 | 11.83 | 93 | 100 | 2.51 |
| X1.4 (Kuantitas pelayanan) | 1 4 | 15.0 5 | 2 8 | 30.1 1 | 4 4 | 47.3 1 | 7 7 | 7.53 | 93 | 100 | 2.53 |
| X1.5 (Dampak BLM) | 1 4 | 15.0 5 | 2 4 | 25.8 1 | 4 7 | 50.5 4 | 8 8 | 8.60 | 93 | 100 | 2.47 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|---|------|---|------|---|-------|----|-----|------|
| X1.6 (Dampak BLM) | 9 | 9.68 | 3 | 34.4 | 4 | 44.0 | 1 | 11.83 | 93 | 100 | 2.42 |
| | | | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | | | | 2.49 |

Sumber : data primer diolah

Dari Tabel 4 diatas, arti huruf SS,S,TS, dan STS adalah sebagai berikut :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa dari 93 responden, terdapat 11 responden atau 11,83% yang menyatakan sangat setuju tentang Prosedur pelayanan Bantuan Langsung Masyarakat, yang menyatakan setuju sebanyak 30 responden atau 32,26%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 49 responden atau 52,69%, yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3 responden atau 3,23%.

Untuk item kedua yaitu kecepatan dan ketepatan dalam pelayanannya menyalurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 responden atau 10,75%, yang menyatakan setuju sebanyak 31 responden atau 33,33%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 47 responden atau 50,54%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 5 responden atau 5,38%.

Untuk item ketiga yaitu penyampaian informasi dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 14 responden atau 15,05%, yang menyatakan setuju sebanyak 30 responden atau 32,26%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 38 responden atau 40,86%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 11 responden atau 11,83%.

Untuk item keempat yaitu pemberitahuan bantuan langsung masyarakat diberikan jauh jauh hari dan tidak mendadak dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 14 responden atau 15,05%, yang menyatakan setuju sebanyak 28 responden atau 30,11%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 44 responden atau 47,31%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 7 responden atau 7,53%.

Untuk item kelima yaitu Pemberian bantuan langsung masyarakat benar-benar diberikan kepada orang yang tepat dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 14 responden atau 15,05%, yang menyatakan setuju sebanyak 24 responden atau 25,81%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 47 responden atau 50,54%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 8 responden atau 8,60%.

Untuk item keenam yaitu bantuan langsung masyarakat, memberikan dampak baik pada perekonomian dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 9 responden atau 9,68%, yang menyatakan setuju sebanyak 24 responden atau 24,81%, yang menyatakan

tidak setuju sebanyak 41 responden atau 44,09%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 11 responden atau 11,83%.

Dalam distribusi frekuensi variabel dana bantuan langsung masyarakat ini, kecenderungan masyarakat dalam memilih pilihan tidak setuju merupakan prosentase yang dipilih masyarakat paling besar dibandingkan dengan pilihan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi di lapangan penelitian baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun dampak dirasakan oleh masyarakat akan program tersebut dinilai masih kurang. Secara teori pembangunan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan dalam proses pengentasan kemiskinan, hal ini perlu disoroti agar pengentasan kemiskinan berjalan maksimal melalui pemberdayaan masyarakat.

2. Distribusi Frekuensi Variabel Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan (X2)

Variabel Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan terdapat enam item pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 5 :

Tabel 5 Distribusi Frekuensi Variabel Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan (X2)

| Item | SS | | S | | TS | | STS | | Jumlah | | Rata-rata |
|--|----|-------|----|-------|----|------|-----|------|--------|-----|-----------|
| | f | % | f | % | f | % | f | % | Jumlah | % | |
| X2.1 (Manfaat Bantuan Dana Pendampingan | 69 | 74.19 | 24 | 25.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 93 | 100 | 3.74 |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|----|-------|---|------|---|------|----|-----|------|------|
| bidang pemavingan Jalan) | | | | | | | | | | | | |
| X2.2 (Manfaat Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan) | 69 | 74.19 | 24 | 25.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 93 | 100 | 3.74 | |
| X2.3 (Manfaat Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan) | 63 | 67.74 | 30 | 32.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 93 | 100 | 3.68 | |
| X2.4 (Manfaat Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan) | 60 | 64.52 | 33 | 35.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 93 | 100 | 3.65 | |
| X2.5 (Dampak Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan) | 63 | 67.74 | 30 | 32.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 93 | 100 | 3.68 | |
| X2.6 (Dampak Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan) | 59 | 63.44 | 34 | 36.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 93 | 100 | 3.63 | |
| | | | | | | | | | | | | 3.69 |

Sumber : data primer diolah

Dari Tabel 4 diatas, arti huruf SS,S,TS, dan STS adalah sebagai berikut :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa dari 93 responden, terdapat 69 responden atau 74,19% yang menyatakan sangat setuju tentang Bantuan PNPM dengan Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan sangat bermanfaat secara langsung, yang menyatakan setuju sebanyak 24 responden atau 25,81%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0 %.

Untuk item kedua yaitu Bantuan PNPM dengan Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan, semua masyarakat dapat memakai atau merasakan manfaatnya dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 69 responden atau 74,19%, yang menyatakan setuju sebanyak 24 responden atau 25,81%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0,0%.

Untuk item ketiga yaitu Bantuan PNPM dengan Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan berdampak baik dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 63 responden

atau 67,74%, yang menyatakan setuju sebanyak 30 responden atau 32,26%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%.

Untuk item keempat yaitu Bantuan PNPM dengan Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan membantu kelancaran dalam beraktivitas dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 60 responden atau 64,52%, yang menyatakan setuju sebanyak 33 responden atau 35,48%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%.

Untuk item kelima yaitu Prosedur bantuan PNPM dengan Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan sesuai dengan rencana dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 63 responden atau 67,74%, yang menyatakan setuju sebanyak 30 responden atau 32,26%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%.

Untuk item keenam yaitu Prosedur bantuan PNPM dengan Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan sudah baik dan tidak mengganggu aktivitas dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 59 responden atau 63,44%, yang menyatakan setuju sebanyak 34 responden atau 36,56%, yang menyatakan tidak setuju

sebanyak 0 responden atau 0%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%.

Dalam distribusi frekuensi variabel Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan ini, kecenderungan masyarakat dalam memilih pilihan sangat setuju merupakan prosentase yang dipilih masyarakat paling besar dibandingkan dengan pilihan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi di lapangan penelitian baik dari segi manfaat maupun dampak dirasakan oleh masyarakat akan program tersebut dinilai sangat baik. Secara teori pembangunan masyarakat melalui bantuan Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan adalah proses bantuan di bidang pra sarana yang akan membantu masyarakat dalam membantu mobilitas masyarakat dan menguntungkan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.

3. Distribusi Frekuensi Variabel Pengentasan Kemiskinan (Y)

Dalam variabel pengentasan Kemiskinan terdapat empat item pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 6 :

Tabel 6 Distribusi Frekuensi Variabel Pengentasan Kemiskinan (Y)

| Item | SS | | S | | TS | | STS | | Jumlah | | Rata-rata |
|--------------------------------|----|-------|----|-------|----|-------|-----|------|--------|-----|-----------|
| | f | % | f | % | f | % | F | % | Jumlah | % | |
| Y1 (Kebebasan Mobilitas) | 57 | 61.29 | 24 | 25.81 | 12 | 12.90 | 0 | 0.00 | 93 | 100 | 3.48 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|----|-------|----|-------|---|------|----|-----|------|
| Y2 (Kemampuan Membeli Komoditas Besar) | 20 | 21.51 | 56 | 60.22 | 17 | 18.28 | 0 | 0.00 | 93 | 100 | 3.03 |
| Y3 (Kemampuan Membeli Komoditas Kecil) | 10 | 10.75 | 39 | 41.94 | 44 | 47.31 | 0 | 0.00 | 93 | 100 | 2.63 |
| Y4 (Jaminan Ekonomi Dan Keluarganya) | 16 | 17.20 | 35 | 37.63 | 36 | 38.71 | 6 | 6.45 | 93 | 100 | 2.66 |
| | | | | | | | | | | | 2.95 |

Dari Tabel 4 diatas, arti huruf SS,S,TS, dan STS adalah sebagai berikut :

- SS : Sangat Setuju
 S : Setuju
 TS : Tidak Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju

Pada Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 93 responden, terdapat 57 responden atau 61,29% yang menyatakan sangat setuju tentang keluar rumah untuk beraktifitas, yang menyatakan setuju sebanyak 24 responden atau 25,81%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12 responden atau 12,90%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%.

Untuk item kedua yaitu Kebutuhan pokok sudah tercukupi dengan baik dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 20 responden atau 21,51%, yang menyatakan setuju sebanyak 56 responden atau 60,22%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 17 responden atau 18,28%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%.

Untuk item ketiga yaitu mampu mencukupi kebutuhan sekunder saudara seperti koran, TV, majalah, dan lain lain dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 10 responden atau 10,75%, yang menyatakan setuju sebanyak 39 responden atau 41,94%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 44 responden atau 47,31%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 0 responden atau 0%.

Untuk item keempat yaitu program Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri berdampak pada peningkatan jaminan keluarga dapat diketahui bahwa responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 16 responden atau 17,20%, yang menyatakan setuju sebanyak 35 responden atau 37,63%, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 36 responden atau 38,71%, dan yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 6 responden atau 6,45%.

J. Uji Instrumen Penelitian

Kuisioner dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisa. Oleh karena itu dalam analisa yang dilakukan lebih bertumpu pada skor responden pada tiap-

tiap amatan. Sedangkan benar tidaknya skor responsi tersebut tergantung pada pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang baik harus memenuhi 2 persyaratan penting yaitu valid dan reliabel.

1. Uji Validitas

Pengujian validitas sangat diperlukan dalam suatu penelitian, khususnya yang menggunakan kuisisioner dalam memperoleh data. Pengujian validitas dimaksudkan untuk mengetahui keabsahan menyakngkut pemahaman mengenai keabsahan antara konsep dan kenyataan empiris. Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur atau dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrument menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.

Pengujian validitas dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing faktor atau variabel dengan total faktor atau variabel tersebut dengan menggunakan korelasi (r) product moment.

Kriteria pengujian untuk menerima atau menolak hipotesis adanya pernyataan yang valid atau tidak dapat dilakukan dengan:

$H_0 : r = 0$, tidak terdapat data yang valid pada tingkat kepercayaan (α) 5%.

$H_1 : r \neq 0$, terdapat data yang valid pada tingkat kepercayaan (α) 5%.

Hipotesa nol (H_0) diterima apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$, demikian sebaliknya hipotesa alternatif (H_1) diterima apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Pengujian validitas yang dilakukan dengan melalui program SPSS ver. 13.0 dengan menggunakan korelasi product moment menghasilkan nilai masing-masing item pernyataan dengan skor item pertanyaan secara keseluruhan dan untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7 Uji Validitas Variabel

| No. | Item | Koefisien Validitas | r tabel | Sig. | Keterangan |
|-----|------|---------------------|---------|-------|------------|
| 1 | X1.1 | 0.900 | 0,220 | 0.000 | Valid |
| 2 | X1.2 | 0.936 | 0,220 | 0.000 | Valid |
| 3 | X1.3 | 0.917 | 0,220 | 0.000 | Valid |
| 4 | X1.4 | 0.895 | 0,220 | 0.000 | Valid |
| 5 | X1.5 | 0.917 | 0,220 | 0.000 | Valid |
| 6 | X1.6 | 0.920 | 0,220 | 0.000 | Valid |
| 7 | X2.1 | 0.698 | 0,220 | 0.000 | Valid |
| 8 | X2.2 | 0.654 | 0,220 | 0.000 | Valid |
| 9 | X2.3 | 0.527 | 0,220 | 0.000 | Valid |
| 10 | X2.4 | 0.599 | 0,220 | 0.000 | Valid |
| 11 | X2.5 | 0.568 | 0,220 | 0.000 | Valid |
| 12 | X2.6 | 0.610 | 0,220 | 0.000 | Valid |
| 13 | Y1 | 0.738 | 0,220 | 0.000 | Valid |
| 14 | Y2 | 0.771 | 0,220 | 0.000 | Valid |
| 15 | Y3 | 0.777 | 0,220 | 0.000 | Valid |

| | | | | | |
|----|----|-------|-------|-------|-------|
| 16 | Y4 | 0.755 | 0,220 | 0.000 | Valid |
|----|----|-------|-------|-------|-------|

Sumber: Data Primer Diolah

Dari Tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa nilai sig. r item pertanyaan lebih kecil dari 0.05 ($\alpha = 0.05$) yang berarti tiap-tiap item variabel adalah valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan tingkat kemantapan, keajegan dan ketepatan suatu alat ukur atau uji yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran relatif konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang. Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Arikunto menjelaskan tentang reliabilitas sebagai berikut :

“Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik “

Teknik pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan nilai koefisien reliabilitas alpha. Kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai dari koefisien reliabilitas alpha lebih besar dari 0,6 maka variabel tersebut sudah reliabel (handal).

Tabel 8 Uji Reliabilitas Variabel

| N o. | Variabel | Koefisien Reliabilitas | Keterangan |
|------|----------|------------------------|------------|
|------|----------|------------------------|------------|

| | | | |
|---|--|-------|----------|
| 1 | Dana Bantuan Langsung Masyarakat (X1) | 0,960 | Reliabel |
| 2 | Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan (X2) | 0,658 | Reliabel |
| 3 | Pengentasan Kemiskinan (Y) | 0.748 | Reliabel |

Sumber: Data primer diolah

Dari tabel 8 diketahui bahwa nilai dari alpha cronbach untuk semua variabel lebih besar dari 0,6. Dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya maka semua variabel yang digunakan untuk penelitian sudah reliabel.

3. Asumsi-Asumsi Klasik Regresi

Asumsi-asumsi klasik ini harus dilakukan pengujiannya untuk memenuhi penggunaan regresi linier berganda. Setelah diadakan perhitungan regresi berganda melalui alat bantu SPSS for Windows, diadakan pengujian uji asumsi klasik regresi. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hipotesis yang digunakan :

H_0 : residual tersebar normal

H_1 : residual tidak tersebar normal

Jika nilai **sig.** (*p-value*) > maka H_0 diterima yang artinya normalitas terpenuhi.

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 9

Tabel 9 Hasil Uji Normalitas

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Unstandardized Residual |
| N | | 93 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 1.49121663 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .063 |
| | Positive | .043 |
| | Negative | -.063 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .608 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .853 |

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah

Dari hasil perhitungan didapat nilai **sig.** sebesar 0.853 (dapat dilihat pada Tabel 9) atau lebih besar dari 0.05; maka ketentuan H_0 diterima yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini untuk mengetahui korelasi antara sisaan yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam deret waktu) atau ruang (seperti dalam data *cross section*). Dalam konteks regresi, model regresi linier klasik mengasumsikan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam sisaan (ϵ_i). Hal ini memperlihatkan bahwa model klasik mengasumsikan bahwa unsur sisaan yang berhubungan dengan pengamatan tidak dipengaruhi oleh sisaan yang berhubungan dengan pengamatan lain yang mana pun

Uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW-test).

Hipotesis yang melandasi pengujian adalah:

$H_0 : \rho = 0$ (tidak terdapat autokorelasi di antara sisaan)

$H_1 : \rho \neq 0$ (terdapat autokorelasi di antara sisaan)

Statistik Durbin-Watson yang dirumuskan oleh statistik d , yaitu:

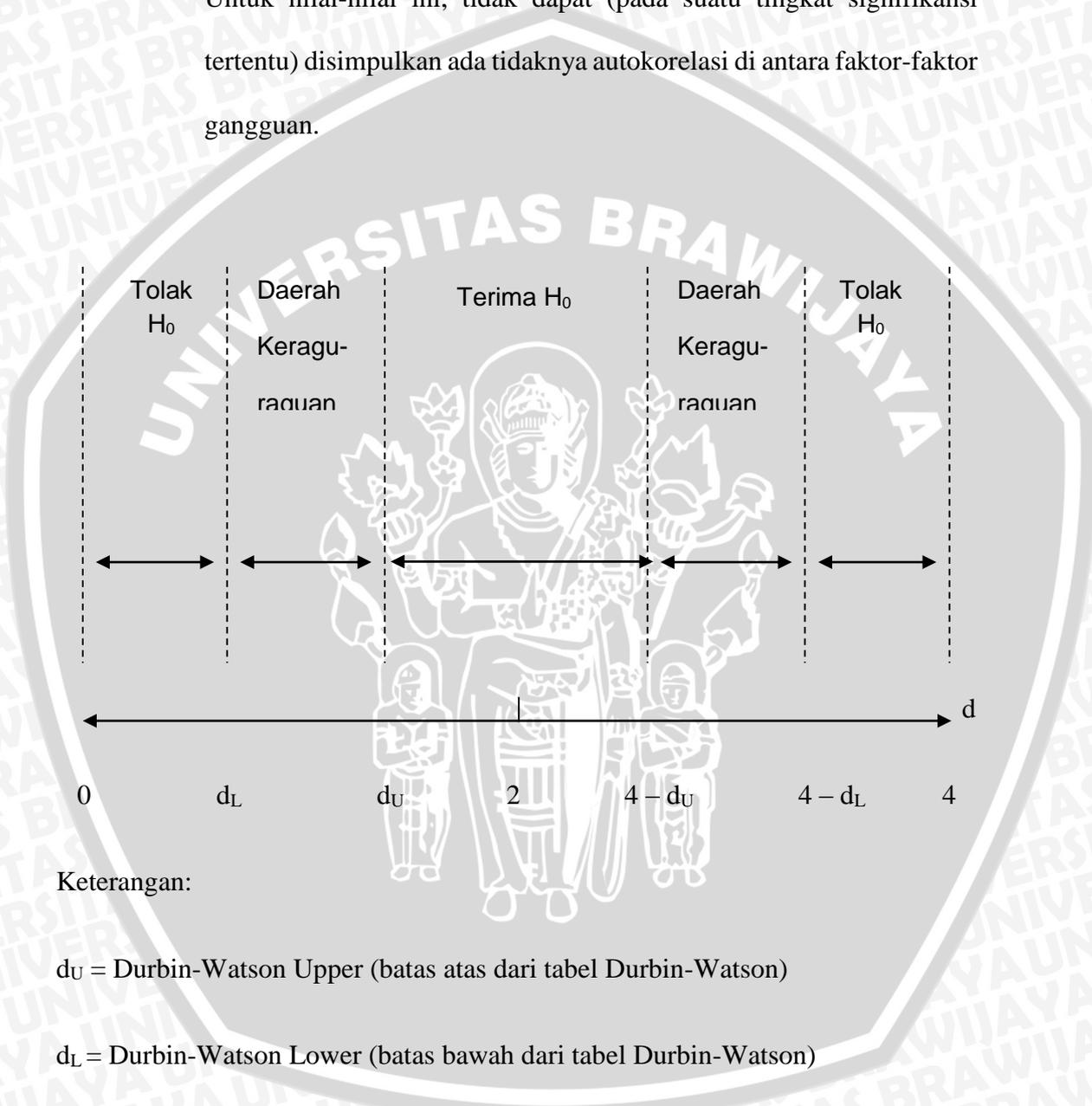
$$d = \frac{\sum (e_t - e_{t-1})^2}{\sum e^2}$$

Banyak pengamatan pada pembilang statistik d adalah $n - 1$ karena satu pengamatan hilang dalam mendapatkan perbedaan yang berurutan.

Prosedur uji Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

1. Dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil (MKT) biasa, hitung koefisien regresi, kemudian tentukan e_i .
2. Dengan menggunakan rumus diatas hitung statistik d
3. Berdasarkan banyaknya pengamatan dan peubah penjelas tentukan nilai-nilai kritis d_L dan d_U .
4. Terapkan kaidah keputusan:
 - a. Jika $d < d_L$ atau $d > (4 - d_L)$, maka H_0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi terhadap sisaan.
 - b. Jika $d_U < d < (4 - d_U)$, maka H_0 diterima, berarti tidak terdapat autokorelasi antar sisaan.

- c. Namun jika $d_L < d < d_U$ atau $(4 - d_U) < d < (4 - d_L)$, maka uji Durbin-Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (inconclusive). Untuk nilai-nilai ini, tidak dapat (pada suatu tingkat signifikansi tertentu) disimpulkan ada tidaknya autokorelasi di antara faktor-faktor gangguan.



Keterangan:

d_U = Durbin-Watson Upper (batas atas dari tabel Durbin-Watson)

d_L = Durbin-Watson Lower (batas bawah dari tabel Durbin-Watson)

Dari tabel Durbin-Watson untuk $n = 93$ dan $k = 2$ (adalah banyaknya variabel bebas) diketahui nilai d_U sebesar 1.703 dan $4 - d_U$ sebesar 2.297. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 10



Tabel 10 Hasil Uji Autokorelasi

| Model | Durbin-Watson |
|-------|---------------|
| 1 | 1.765 |

Sumber: Data primer diolah

Dari Tabel 10 diketahui nilai uji Durbin Watson sebesar 1,765 yang terletak antara 1.703 dan 2.297, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi tidak terdapat autokorelasi telah terpenuhi.

c. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai Tolerance yang didapat dari perhitungan regresi berganda, apabila nilai tolerance $< 0,1$ maka terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11 Hasil Uji Multikolinieritas

| Model | Collinearity Statistics | |
|-------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| 1 X1 | .849 | 1.178 |
| X2 | .849 | 1.178 |

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 11, berikut hasil pengujian dari masing-masing variabel bebas:

- Tolerance untuk Dana Bantuan Langsung Masyarakat adalah 0.849
- Tolerance untuk Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan adalah 0.849

Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance $> 0,1$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF (Variance Inflation Faktor) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengujian masing-masing variabel bebas :

- VIF untuk Dana Bantuan Langsung Masyarakat adalah 1,178
- VIF untuk Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan adalah 1,178

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolinearitas dapat terpenuhi.

d. Uji Heterokedastisitas

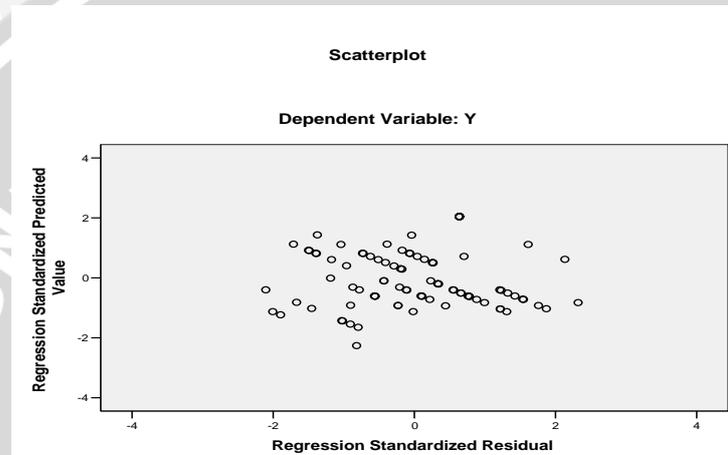
Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu variabel bebas. Atau adanya perbedaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan Uji scatter plot. Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis:

H_0 : ragam sisaan homogen

H_1 : ragam sisaan tidak homogen

Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel 12

Tabel 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data primer diolah

Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan *scatterplot* menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas maka dapat dikatakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudah layak atau tepat. Sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas, yaitu Dana Bantuan Langsung Masyarakat (X_1) dan Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan (X_2) terhadap variabel terikat yaitu Pengentasan Kemiskinan (Y).

a. Persamaan Regresi

Persamaan regresi digunakan mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan *SPSS for Windows ver 13.00* didapat model regresi seperti pada Tabel 13 :

Tabel 13 Persamaan Regresi

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 3.274 | 2.081 | | 1.573 | .119 |
| | X1 | .322 | .038 | .666 | 8.487 | .000 |
| | X2 | .168 | .101 | .131 | 1.669 | .099 |

Berdasarkan pada Tabel 13 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 3,274 + 0,322 X_1 + 0,168 X_2$$

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Pengentasan Kemiskinan akan meningkat sebesar 0,322 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_1 (Dana Bantuan Langsung Masyarakat). Jadi apabila Dana Bantuan Langsung Masyarakat mengalami peningkatan 1

satuan, maka Pengentasan Kemiskinan akan meningkat sebesar 0,322 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

- Pengentasan Kemiskinan akan meningkat sebesar 0.168 satuan untuk setiap tambahan satu satuan X_2 (Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan), Jadi apabila Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan mengalami peningkatan 1 satuan, maka Pengentasan Kemiskinan akan meningkat sebesar 0.168 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

Berdasarkan interpretasi di atas, dapat diketahui besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat, antara lain Dana Bantuan Langsung Masyarakat sebesar 0,322, Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan sebesar 0,168. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Bantuan Langsung Masyarakat dan Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan berpengaruh positif terhadap Pengentasan Kemiskinan. Dengan kata lain, apabila bahwa Dana Bantuan Langsung Masyarakat dan Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan meningkat maka akan diikuti peningkatan Pengentasan Kemiskinan.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas (Dana Bantuan Langsung Masyarakat (X_1) dan Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan (X_2) terhadap variabel terikat (Pengentasan Kemiskinan) digunakan nilai R^2 , nilai R^2 seperti dalam Tabel 14 dibawah ini:

Tabel 14 Koefisien Korelasi dan Determinasi

| Model | R | R Square | Adjusted R Square |
|-------|------|----------|-------------------|
| 1 | .727 | .529 | .519 |

Sumber : Data primer diolah

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis pada Tabel 14 diperoleh hasil R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,529 Artinya bahwa 52,9% variabel Pengentasan Kemiskinan akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu Dana Bantuan Langsung Masyarakat (X_1) dan Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan (X_2). Sedangkan sisanya 47,1 variabel Pengentasan Kemiskinan akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Dana Bantuan Langsung Masyarakat dan Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan dengan variabel Pengentasan Kemiskinan, nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0.727, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu Dana Bantuan Langsung Masyarakat (X_1) dan Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan (X_2) dengan Pengentasan Kemiskinan termasuk dalam kategori kuat karena berada pada selang 0,6 – 0,8. Hubungan antara variabel bebas yaitu Dana Bantuan Langsung Masyarakat (X_1) dan Bantuan Dana Pendampingan bidang

pemavingan Jalan (X_2) dengan Pengentasan Kemiskinan bersifat positif, artinya jika variabel bebas semakin ditingkatkan maka Pengentasan Kemiskinan juga akan mengalami peningkatan.

5. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian, setelah data terkumpul dan diolah. Kegunaan utamanya adalah untuk menjawab hipotesis yang dibuat oleh peneliti.

a. Hipotesis I (F test / Simultan)

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang diduga tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signifikan, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut :

H_0 ditolak jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$

H_0 diterima jika $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$

Tabel 15 Hasil Uji F/Simultan

ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 229.933 | 2 | 114.967 | 50.576 | .000 ^a |
| | Residual | 204.583 | 90 | 2.273 | | |
| | Total | 434.516 | 92 | | | |

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 15 nilai F hitung sebesar 50,576. Sedangkan F tabel ($\alpha = 0.05$; db regresi = 2 : db residual = 90) adalah sebesar 3,098. Karena F hitung > F tabel yaitu $50,576 > 3,098$ atau nilai sig F ($0,000 < \alpha = 0.05$) maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat (Pengentasan Kemiskinan) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas (Dana Bantuan Langsung Masyarakat (X_1) dan Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan (X_2)).

b. Hipotesis II (t test / Parsial)

t test digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Dapat juga dikatakan jika t hitung > t tabel atau -t hitung < -t tabel maka hasilnya signifikan dan berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sedangkan jika t hitung < t tabel atau -t hitung > -t tabel maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil dari uji t dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16 Hasil Uji t / Parsial

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 3.274 | 2.081 | | 1.573 | .119 |
| | X1 | .322 | .038 | .666 | 8.487 | .000 |
| | X2 | .168 | .101 | .131 | 1.669 | .099 |

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 16 diperoleh hasil sebagai berikut :

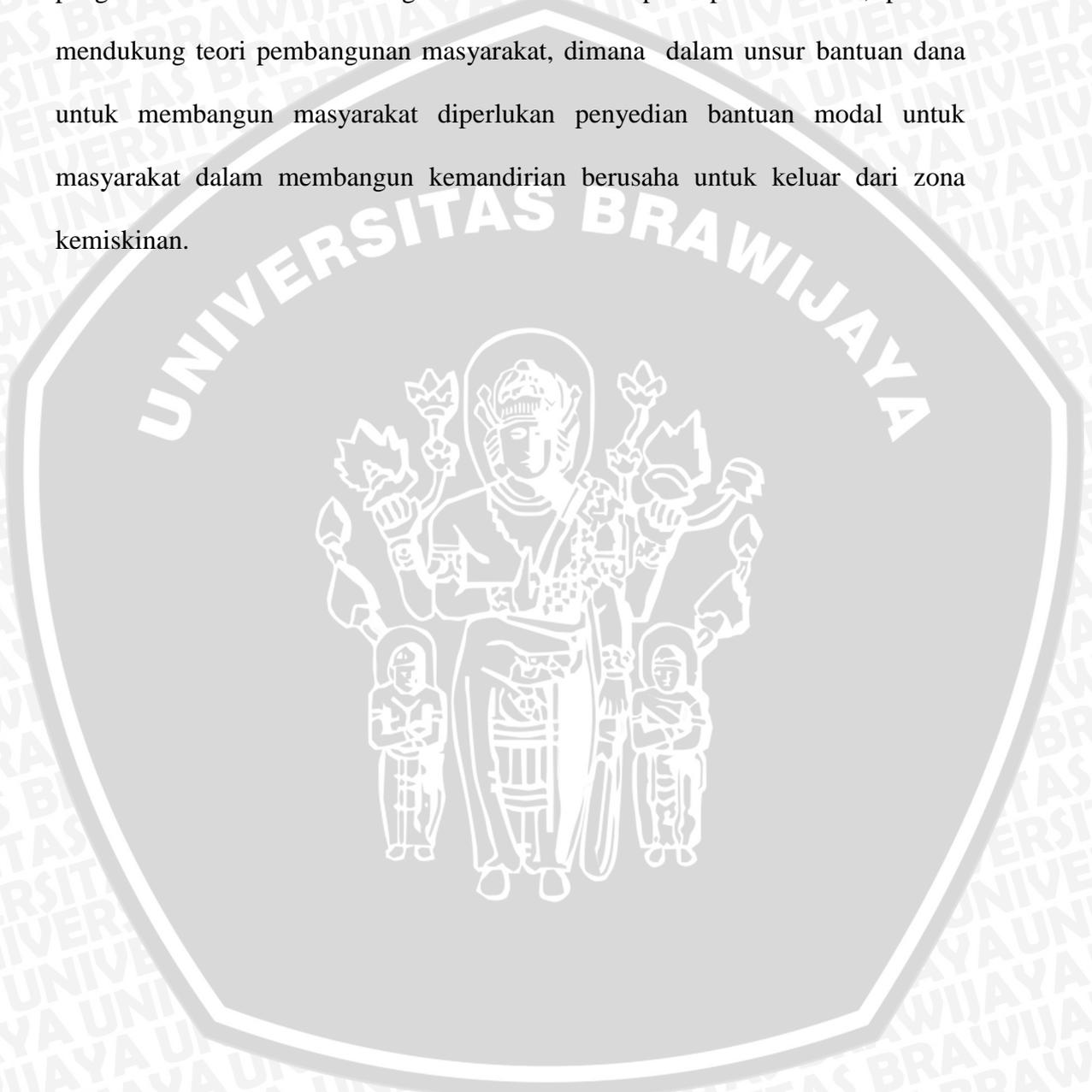
- t test antara X_1 (Dana Bantuan Langsung Masyarakat) dengan Y (Pengentasan Kemiskinan) menunjukkan t hitung = 8,487. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 90) adalah sebesar 1,987. Karena t hitung > t tabel yaitu $8,487 > 1,987$ atau nilai sig t (0,000) < $\alpha = 0.05$ maka pengaruh X_1 (Dana Bantuan Langsung Masyarakat) terhadap Pengentasan Kemiskinan adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengentasan Kemiskinan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Dana Bantuan Langsung Masyarakat atau dengan meningkatkan Dana Bantuan Langsung Masyarakat maka Pengentasan Kemiskinan akan mengalami peningkatan secara nyata.
- t test antara X_2 (Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan) dengan Y (Pengentasan Kemiskinan) menunjukkan t hitung = 1,669. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 90) adalah sebesar 1,987. Karena t hitung < t tabel yaitu $1,669 < 1,987$ atau nilai sig t (0,099) > $\alpha = 0.05$ maka pengaruh X_2 (Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan) terhadap Pengentasan Kemiskinan adalah tidak signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa

Pengentasan Kemiskinan dapat dipengaruhi secara tidak signifikan oleh Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan atau dengan meningkatkan Bantuan Dana Pendampingan bidang pemavingan Jalan maka Pengentasan Kemiskinan akan mengalami peningkatan secara tidak nyata.

Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pengentasan Kemiskinan secara simultan dan parsial. Dan dari sini dapat diketahui bahwa kedua variabel bebas tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap Angka kemiskinan adalah Dana Bantuan Langsung Masyarakat karena memiliki nilai koefisien beta dan t hitung paling besar.

Dari hasil uji parsial, antara dana bantuan langsung masyarakat dengan pengentasan kemiskinan menunjukkan t hitung = 8,487. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 90) adalah sebesar 1,987. Karena t hitung > t tabel yaitu $8,487 > 1,987$ atau nilai sig t ($0,000$) < $\alpha = 0.05$ maka pengaruh dana bantuan langsung masyarakat terhadap pengentasan kemiskinan adalah signifikan. Dilihat dari beberapa masyarakat yang memperoleh dana bantuan langsung masyarakat ini, mereka mampu untuk mengelola dan keluar dari garis kemiskinan. Akan tetapi, banyaknya masyarakat miskin di desa tersebut, tidak sebanding dengan dana bantuan langsung masyarakat yang diberikan pemerintah. Apabila pemerintah ingin mensukseskan Program Nasional Pembangunan Masyarakat (PNPM) Mandiri di desa Karangrejo kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung yang mempunyai tujuan mengentaskan kemiskinan, maka pemerintah perlu

meningkatkan bantuan langsung masyarakat guna memberikan *stimulus* agar masyarakatnya lebih mandiri serta dapat meningkatkan keberhasilan dalam program pengentasan kemiskinan. Dengan demikian maka pada penelitian ini, penulis mendukung teori pembangunan masyarakat, dimana dalam unsur bantuan dana untuk membangun masyarakat diperlukan penyediaan bantuan modal untuk masyarakat dalam membangun kemandirian berusaha untuk keluar dari zona kemiskinan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel mana sajakah yang mempunyai pengaruh pada Pengentasan kemiskinan. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah variabel Dana Bantuan Langsung Masyarakat (X_1) dan Pemavingan jalan (X_2) sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah Pengentasan kemiskinan (Y).

Berdasarkan pada penghitungan analisis regresi linier berganda, dapat diketahui :

1. Pengaruh secara simultan (bersama-sama) tiap variabel bebas terhadap Pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pengujian F-test. Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 50,576, sedangkan F_{tabel} pada taraf signifikan 0,05 menunjukkan nilai sebesar 3,098. Hal tersebut berarti F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap Pengentasan kemiskinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel bebas terhadap variabel Pengentasan kemiskinan dapat diterima.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara individu (parsial) variabel bebas (Dana Bantuan Langsung Masyarakat (X_1) dan Pemavingan jalan (X_2) terhadap

Pengentasan kemiskinan dilakukan dengan pengujian t-test. Berdasarkan pada hasil uji didapatkan bahwa kedua variabel mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pengentasan kemiskinan yaitu Dana Bantuan Langsung Masyarakat

3. Berdasarkan pada hasil uji t didapatkan bahwa variabel Dana Bantuan Langsung Masyarakat mempunyai nilai t hitung dan koefisien beta yang paling besar. Sehingga variabel Dana Bantuan Langsung Masyarakat mempunyai pengaruh yang paling kuat dibandingkan dengan variabel yang lainnya maka variabel Dana Bantuan Langsung Masyarakat mempunyai pengaruh yang dominan terhadap pengentasan kemiskinan.

$$Y = 3,274 + 0,322 X_1 + 0,168 X_2$$

Berdasar pada rumus di atas, dapat diketahui besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat, antara lain dana bantuan langsung masyarakat sebesar 0,322 dan pemavingan jalan sebesar 0,168. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana bantuan langsung masyarakat dan pemavingan jalan berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak-pihak lain. Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. Diharapkan pihak pemerintah dapat mempertahankan serta meningkatkan pelayanan terhadap Dana Bantuan Langsung Masyarakat, karena variabel Dana Bantuan Langsung Masyarakat mempunyai pengaruh yang dominan

dalam mempengaruhi pengentasan kemiskinan, diantaranya yaitu dengan meningkatkan bantuan langsung masyarakat (PNPM) Mandiri guna memberikan *stimulus* agar masyarakatnya lebih mandiri sehingga pengentasan kemiskinan akan meningkat.

2. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi Pengentasan kemiskinan diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang merupakan variabel lain diluar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bahri, Efri S. "Alternatif Strategi Pembangunan Sosial untuk Indonesia", dipublikasikan oleh suarapembaca.detik.com pada Selasa, 18/08/2009.
- Bobby Ridwan Simaremare (2011). *Pengaruh Program PNPM-P2KP Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sidikalang, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi*. Universitas Sumatra Utara, Medan: Disertai yang tidak dipublikasikan.
- Dapper and Smith H.1992. *Analisis Regresi Terapan*. Mount Sinai School of Medicine, PT Gramedia Pustaka Jakarta.
- Diana Agustina Imbarwati (2009). *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan (Studi tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri (PNPM-Mnadiri) di kelurahan di Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)*. Universitas Brawijaya, Malang: Disertai yang tidak dipublikasikan.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kartasmita, Ginanjar. 2006. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cakra.
- Kusmayadi, Edi. 2012. "*Pembangunan Masyarakat*", dipublikasikan oleh edikusmayadi.blogspot.com pada Selasa, 15/02/2013.
- Mansur (2012). *Pelaksanaan Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan Studi di kelurahan Temas kecamatan Batu kota Batu*. Universitas Brawijaya: Disertai yang tidak dipublikasikan.
- Mardimin, Johanes. 1996. *Dimensi Kritis Protes Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mubyarto. 1997. *Gerakan Nasional Penanggulangan Kemiskinan, Kajian Bersama Pengembangan Kebijakan*. Aditya Media.
- Muhammad Akhir Yaacob & Hailani Muji Tahir. 1983. *Islam Dan Beberapa Persoalan Semasa*. Bangi: Badan Dakwah Dan Kebajikan Islam Malaysia (AI-RAHMANIAH).
- Nasution. 2004. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat Mepersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Cetakan Kedua Rineka Cipta Jakarta.

Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.

Tambunan, Tulus T. H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta. Salemba Empat.

Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustapadidjaja A.R. 1984. *Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Suharto, Edi. 2007. *Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi dan Strategi*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS.

Suharto, Edi. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pembangunan*. Yogyakarta: Grava Media

Suprpto, R. R. 2002. *Jurnal-Jurnal Ilmu Sosial, Strategi dan Model Pembinaan dan Pengembangan UMKM Kota Pasuruan*.

Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.

Wahyu Safarulloh (2008). *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang)*. Universitas Brawijaya, Malang: Disertai yang tidak dipublikasikan.

www.pnpm-mandiri.org (http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=269) diakses pada tanggal 5 februari 2013 pukul 19.16

www.pnpm-mandiri.org (http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=267) diakses pada tanggal 5 februari 2013 pukul 19.16

www.smescoindonesia.com diakses pada tanggal 14 september 2012 pukul 20.23

www.radartulungagung.co.id (<http://www.radartulungagung.co.id/ekonomi/5129-promosi-hasil-pertanian.html>) diakses pada tanggal 5 februari 2013 pukul 19.25



Nomor Responden:

“KUESIONER PENELITIAN”

Penelitian tentang:

Pengaruh Program Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Terhadap Penurunan Angka Kemiskinan

(Studi pada Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penelitian yang saya lakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Daftar Pertanyaan ini semata-mata bersifat ilmiah, yaitu sebagai bahan penelitian akademis di Universitas Brawijaya Malang. Maka dari itu, Bapak/Ibu/Saudara/Saudari dimohon dengan hormat mengisi kuesioner ini dengan sebenar-benarnya berdasarkan atas apa yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari rasakan dan ketahui dengan adanya PNPM Mandiri. Peneliti menjamin rahasia jawaban yang saudara berikan, karena jawaban tersebut hanya sebagai bahan peneliti (skripsi). Semoga dengan data yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan dapat bermanfaat untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta dapat membantu upaya meningkatkan kualitas program PNPM Mandiri. Atas kerjasamanya dan partisipasi yang diberikan, saya ucapkan terimakasih

Malang, April 2013

Peneliti

Rochandani Istifar

A. Identitas Responden

Nama : _____

Jenis Kelamin : _____

INFORMASI DEMOGRAFIS

Petunjuk : Berilah tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat saudara.

1. Berapa kali saudara keluar rumah pada setiap harinya?
 - a. > 4 Kali
 - b. 3 – 4 Kali
 - c. 1 – 2 Kali
 - d. Tidak Pernah
2. Berapa jarak kilometer setiap hari saudara/saudari keluar rumah?
 - a. > 4 Km
 - b. 2 Km – 4 Km
 - c. 1 Km – 2 Km
 - d. < 1 Km
3. Berapa biaya yang saudara keluarkan untuk membeli kebutuhan sembako dalam satu bulan?
 - a. > Rp 100.000
 - b. Rp. 50.000 – Rp 100.000
 - c. Rp 25.000 – Rp 50.000
 - d. < Rp. 25.000
4. Berapa nominal transportasi yang saudara miliki saat ini?
 - a. > Rp. 7.500.000
 - b. Rp. 7.500.000 – Rp. 1.000.000
 - c. Rp. 1.000.000 – Rp. 100.000
 - d. < Rp. 100.000
5. Berapa jumlah pendapatan saudara rata-rata dalam 3 bulan.

- a. > Rp 6.000.000
450.000
- b. Rp. 6.000.000 – Rp. 1.500.000
- c. Rp. 1.500.000 – Rp.
450.000
- d. < Rp. 450.000

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Petunjuk : Pada pernyataan dibawah ini silahkan mengisi sesuai dengan pendapat dan opini Anda dengan memberikan tanda (X) pada jawaban.

(X₁)

1. Prosedur pelayanan Bantuan Langsung Masyarakat di Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung sudah baik.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak Setuju
 - d. Sangat Tidak Setuju
2. Petugas pelayanan sudah baik dilihat dari segi kecepatan dan ketepatan dalam pelayanannya menyalurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak Setuju
 - d. Sangat Tidak Setuju
3. Petugas sudah baik dalam menyampaikan informasi sehingga saudara/saudari mudah memahami apa yang disampaikan.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak Setuju
 - d. Sangat Tidak Setuju
4. Tanggal pemberitahuan bantuan langsung masyarakat sudah baik diberikan jauh jauh hari dan tidak mendadak.
 - a. Sangat Setuju
 - b. Setuju
 - c. Tidak Setuju
 - d. Sangat Tidak Setuju

5. Pemberian bantuan langsung masyarakat sudah baik dan benar-benar diberikan kepada orang yang tepat.

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

6. Dengan adanya bantuan langsung masyarakat, memberikan dampak baik pada perekonomian saudara.

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

(X₂)

7. Bantuan PNPM dengan Pemavingan Jalan sangat bermanfaat secara langsung.

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

8. Bantuan PNPM dengan Pemavingan Jalan, semua masyarakat dapat memakai atau merasakan manfaatnya.

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

9. Bantuan PNPM dengan Pemavingan Jalan berdampak baik bagi saudara.

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

10. Bantuan PNPM dengan Pemavingan Jalan membantu kelancaran saudara dalam beraktivitas.

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

11. Prosedur bantuan PNPM dengan Pemavingan Jalan sesuai dengan rencana.

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

12. Prosedur bantuan PNPM dengan Pemavingan Jalan sudah baik dan tidak mengganggu aktivitas saudara.

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

(Y)

13. Saudara sering keluar rumah untuk beraktifitas.

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

14. Kebutuhan pokok saudara sudah tercukupi dengan baik semuanya.

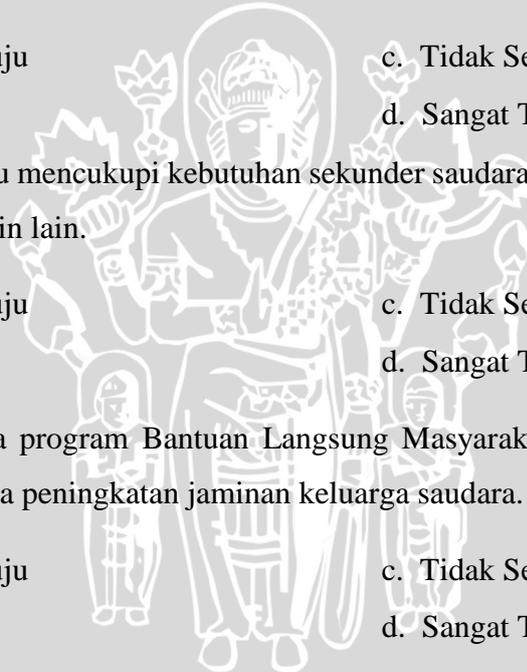
- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

15. Saudara mampu mencukupi kebutuhan sekunder saudara seperti koran, TV, majalah, dan lain lain.

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju

16. Dengan adanya program Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri berdampak pada peningkatan jaminan keluarga saudara.

- a. Sangat Setuju
- b. Setuju
- c. Tidak Setuju
- d. Sangat Tidak Setuju



Lampiran 1. Frekuensi Jawaban Responden

Frequency Table

X1.1

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 4.00 | 11 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| | 3.00 | 30 | 32.3 | 32.3 | 44.1 |
| | 2.00 | 49 | 52.7 | 52.7 | 96.8 |
| | 1.00 | 3 | 3.2 | 3.2 | 100.0 |
| | Total | 93 | 100.0 | 100.0 | |

X1.2

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 4.00 | 10 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| | 3.00 | 31 | 33.3 | 33.3 | 44.1 |
| | 2.00 | 47 | 50.5 | 50.5 | 94.6 |
| | 1.00 | 5 | 5.4 | 5.4 | 100.0 |
| | Total | 93 | 100.0 | 100.0 | |

X1.3

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 4.00 | 14 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| | 3.00 | 30 | 32.3 | 32.3 | 47.3 |
| | 2.00 | 38 | 40.9 | 40.9 | 88.2 |
| | 1.00 | 11 | 11.8 | 11.8 | 100.0 |
| | Total | 93 | 100.0 | 100.0 | |

X1.4

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 4.00 | 14 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| | 3.00 | 28 | 30.1 | 30.1 | 45.2 |
| | 2.00 | 44 | 47.3 | 47.3 | 92.5 |
| | 1.00 | 7 | 7.5 | 7.5 | 100.0 |
| | Total | 93 | 100.0 | 100.0 | |



X1.5

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 4.00 | 14 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
| | 3.00 | 24 | 25.8 | 25.8 | 40.9 |
| | 2.00 | 47 | 50.5 | 50.5 | 91.4 |
| | 1.00 | 8 | 8.6 | 8.6 | 100.0 |
| Total | | 93 | 100.0 | 100.0 | |

X1.6

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 4.00 | 9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| | 3.00 | 32 | 34.4 | 34.4 | 44.1 |
| | 2.00 | 41 | 44.1 | 44.1 | 88.2 |
| | 1.00 | 11 | 11.8 | 11.8 | 100.0 |
| Total | | 93 | 100.0 | 100.0 | |

X2.1

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 4.00 | 69 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| | 3.00 | 24 | 25.8 | 25.8 | 100.0 |
| | Total | 93 | 100.0 | 100.0 | |

X2.2

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 4.00 | 69 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
| | 3.00 | 24 | 25.8 | 25.8 | 100.0 |
| | Total | 93 | 100.0 | 100.0 | |

X2.3

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 4.00 | 63 | 67.7 | 67.7 | 67.7 |
| | 3.00 | 30 | 32.3 | 32.3 | 100.0 |
| | Total | 93 | 100.0 | 100.0 | |



X2.4

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 4.00 | 60 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| | 3.00 | 33 | 35.5 | 35.5 | 100.0 |
| Total | | 93 | 100.0 | 100.0 | |

X2.5

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 4.00 | 63 | 67.7 | 67.7 | 67.7 |
| | 3.00 | 30 | 32.3 | 32.3 | 100.0 |
| Total | | 93 | 100.0 | 100.0 | |

X2.6

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 4.00 | 59 | 63.4 | 63.4 | 63.4 |
| | 3.00 | 34 | 36.6 | 36.6 | 100.0 |
| Total | | 93 | 100.0 | 100.0 | |

Y1

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 4.00 | 57 | 61.3 | 61.3 | 61.3 |
| | 3.00 | 24 | 25.8 | 25.8 | 87.1 |
| | 2.00 | 12 | 12.9 | 12.9 | 100.0 |
| Total | | 93 | 100.0 | 100.0 | |

Y2

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 4.00 | 20 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| | 3.00 | 56 | 60.2 | 60.2 | 81.7 |
| | 2.00 | 17 | 18.3 | 18.3 | 100.0 |
| Total | | 93 | 100.0 | 100.0 | |

Y3

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 4.00 | 10 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| | 3.00 | 39 | 41.9 | 41.9 | 52.7 |
| | 2.00 | 44 | 47.3 | 47.3 | 100.0 |
| Total | | 93 | 100.0 | 100.0 | |



Y4

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 4.00 | 16 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
| 3.00 | 35 | 37.6 | 37.6 | 54.8 |
| 2.00 | 36 | 38.7 | 38.7 | 93.5 |
| 1.00 | 6 | 6.5 | 6.5 | 100.0 |
| Total | 93 | 100.0 | 100.0 | |



Lampiran 2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Correlations

| | | X1 |
|------|---------------------|--------|
| X1.1 | Pearson Correlation | .900** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 |
| | N | 93 |
| X1.2 | Pearson Correlation | .936** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 |
| | N | 93 |
| X1.3 | Pearson Correlation | .917** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 |
| | N | 93 |
| X1.4 | Pearson Correlation | .895** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 |
| | N | 93 |
| X1.5 | Pearson Correlation | .917** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 |
| | N | 93 |
| X1.6 | Pearson Correlation | .920** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 |
| | N | 93 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 93 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 93 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .960 | 6 |



Correlations

Correlations

| | | X2 |
|------|---------------------|--------|
| X2.1 | Pearson Correlation | .698** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 |
| | N | 93 |
| X2.2 | Pearson Correlation | .654** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 |
| | N | 93 |
| X2.3 | Pearson Correlation | .527** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 |
| | N | 93 |
| X2.4 | Pearson Correlation | .599** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 |
| | N | 93 |
| X2.5 | Pearson Correlation | .568** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 |
| | N | 93 |
| X2.6 | Pearson Correlation | .610** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 |
| | N | 93 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 93 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 93 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .658 | 6 |

Correlations

Correlations

| | | Y |
|----|---------------------|--------|
| Y1 | Pearson Correlation | .738** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 |
| | N | 93 |
| Y2 | Pearson Correlation | .771** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 |
| | N | 93 |
| Y3 | Pearson Correlation | .777** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 |
| | N | 93 |
| Y4 | Pearson Correlation | .755** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 |
| | N | 93 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Reliability

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 93 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 93 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .748 | 4 |

Lampiran 3. Asumsi Klasik Regresi

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .727 ^a | .529 | .519 | 1.50769 | 1.765 |

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

| Model | | Collinearity Statistics | |
|-------|----|-------------------------|-------|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | X1 | .849 | 1.178 |
| | X2 | .849 | 1.178 |

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 93 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 1.49121663 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .063 |
| | Positive | .043 |
| | Negative | -.063 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .608 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .853 |

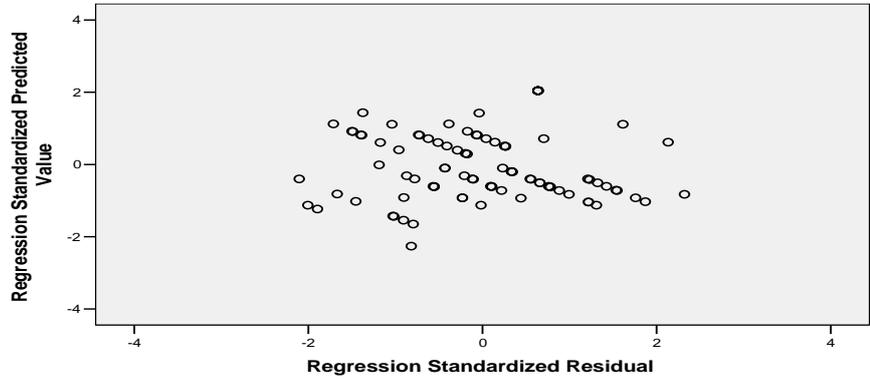
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Scatterplot

Dependent Variable: Y



Lampiran 4. Analisis Regresi Linier Berganda

Regression

Descriptive Statistics

| | Mean | Std. Deviation | N |
|----|---------|----------------|----|
| Y | 11.8065 | 2.17325 | 93 |
| X1 | 14.9462 | 4.49726 | 93 |
| X2 | 22.1183 | 1.69301 | 93 |

Correlations

| | | Y | X1 | X2 |
|---------------------|----|-------|-------|-------|
| Pearson Correlation | Y | 1.000 | .717 | .390 |
| | X1 | .717 | 1.000 | .389 |
| | X2 | .390 | .389 | 1.000 |
| Sig. (1-tailed) | Y | . | .000 | .000 |
| | X1 | .000 | . | .000 |
| | X2 | .000 | .000 | . |
| N | Y | 93 | 93 | 93 |
| | X1 | 93 | 93 | 93 |
| | X2 | 93 | 93 | 93 |

Variables Entered/Removed^a

| Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
|-------|---------------------|-------------------|--------|
| 1 | X2, X1 ^a | . | Enter |

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .727 ^a | .529 | .519 | 1.50769 | 1.765 |

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y



ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 229.933 | 2 | 114.967 | 50.576 | .000 ^a |
| | Residual | 204.583 | 90 | 2.273 | | |
| | Total | 434.516 | 92 | | | |

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 3.274 | 2.081 | | 1.573 | .119 |
| | X1 | .322 | .038 | .666 | 8.487 | .000 |
| | X2 | .168 | .101 | .131 | 1.669 | .099 |

a. Dependent Variable: Y

